BADAN POM

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

BALAI BESAR POM DI JAKARTA

Jl. As'syafiiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13870

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021 Triwulan II. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan kepemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja target Triwulan II tahun 2021 evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 Juli 2021

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech,Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; dan
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 diukur terhadap 28 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada Triwulan II tahun 2021, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, dengan 28 indikator. Dari 28 (dua puluh delapan) Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori "**baik**" (90% ≤ x <110%); 3 (tiga) indikator mencapai kategori "**cukup**" (70% ≤ x < 90%); 5 (lima) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori "**tidak dapat disimpulkan**", 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori "**sangat baik**" (110% ≤ x <120%). Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada Triwulan II tahun 2021 semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta belum dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya:

Dua (2) sasaran strategis lainnya dengan capaian indikator kinerja **"tidak dapat disimpulkan" (x >120%)** yang meliputi sasaran strategis "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta" dengan capaian rata-rata 121,65%, "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta" dengan capaian rata-rata 124,55%.

Tiga (3) sasaran strategis lainnya dengan capaian indikator kinerja **"baik" (90 ≤ x <110)** yang meliputi sasaran strategis "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta" dengan capaian rata-rata 97,52%, "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta" dengan capaian rata-rata 107,84%, dan "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta" dengan capaian sebesar 102,06%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dua (2) sasaran strategis mempunyai capaian indikator kinerja dengan kriteria **"cukup" (70 ≤ x <90) diantaranya** adalah sasaran strategis "Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel" dengan capaian 78,95% ". "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian 85%".

Empat (4) sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan", "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta", "Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal", dan "Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal". Untuk sasaran strategis ini **belum** dapat dihitung dikarenakan merupakan indeks dan bisa dihitung pada akhir tahun 2021.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 46.199.752.000,- (empat puluh enam milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp 18.419.470.400,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 39,87%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Dengan telah diraihnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2020, BBPOM di Jakarta memperkuat implementasi RB melalui berbagai kegiatan internalisasi kepada pegawai. Demi mendukung terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus kegiatan pada 2021 adalah peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan **kegiatan terobosan** (***breakthrough***) di Triwulan II tahun 2021 sebagai berikut:

1. **Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat**

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) titik selama Triwulan II Tahun 2021, yaitu pada 3 April, 5 April, 8 April, 19 April, 5 Juni dan 10 Juni 2021 dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan. Total jumlah peserta dari kegiatan KIE ini yaitu 3000 orang berasal dari beberapa komunitas masyarakat seperti komunitas Ibu PKK dan Karang Taruna. Materi penyuluhan Obat dan Makanan disampaikan oleh narasumber Balai Besar POM di Jakarta, anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., serta Suku Dinas Kesehatan Tingkat Kota Administrasi DKI Jakarta.

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan masyakarakat dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan obat dan pangan dengan menjadi konsumen cerdas dalam membeli produk obat dan pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. **Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Bersama Tim Terpadu Jakarta Timur di Pasar Tradisional Menjelang Ramadhan**

Pada Selasa, 6 April 2021, BBPOM di Jakarta bersama Tim Terpadu Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan Pengawasan Keamanan Pangan menjelang bulan suci Ramadhan. Kegiatan yang dipimpin oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, SSi, MAP, dan Kepala BBPOM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes, ini merupakan bentuk koordinasi dan komitmen BBPOM di Jakarta bersama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

3. **Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan di Ritel Modern Menjelang Ramadhan Bersama Tim Terpadu Jakarta Timur**

Pada Jumat, 09 April 2021, BBPOM di Jakarta bersama Tim Terpadu Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan Pengawasan Keamanan Pangan menjelang bulan suci Ramadhan di Lulu Hypermarket. Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Hendra Hidayat dan Kepala BBPOM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes, ini merupakan bentuk koordinasi dan komitmen BBPOM di Jakarta bersama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Pengawasan Bersama Tim Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Tradisional

Pada Selasa, 4 Mei 2021, BBPOM di Jakarta bersama Tim Terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan Pengawasan Keamanan Pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Senen blok III. Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, S.Sos., M.Si dan Kepala BBPOM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes, merupakan bentuk koordinasi dan komitmen BBPOM di Jakarta bersama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam melindungi masyarakat dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

5. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Kelurahan Intervensi Desa Pangan Aman Tahun 2021

BBPOM di Jakarta melaksanakan rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan (KKPD) dalam rangka Desa Pangan Aman Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 bertempat di 9 (sembilan) kelurahan intervensi, yaitu Kelurahan Bendungan Hilir, Kenari, Harapan Mulia, Galur, Petojo Selatan, Cikini, Gunung Sahari Utara, Sumur Batu, dan Rawasari, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Bimbingan teknis Uji *Staphylococcus Aureus* dan ALT - AKK Pada Obat di Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta.

Balai Besar POM di Jakarta kembali memperkuat kompetensi jajarannya dengan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) Uji *Staphylococcus aureus* pada Obat Sediaan Oral serta ALT dan AKK pada Obat Sediaan Kulit (Cutaneous) pada tanggal 24-28 Mei 2021. Bimtek diikuti oleh Koordinator Pengujian, Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi dan penguji dari Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar POM di Jakarta. Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan jaminan mutu hasil pengujian dan kompetensi penguji. Selain itu, tentunya juga menambah ruang lingkup pengujian mikrobiologi sehingga meningkatkan cakupan pengawasan obat dan makanan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat.

7. Operasi Pangea, BBPOM di Jakarta Sita Ribuan Obat Tradisional Ilegal yang Diklaim Untuk Pengobatan Covid-19

Sejalan dengan itu, dalam upaya pengawasan peredaran obat tradisional Lianhua Qingwen Capsules (LQC) tanpa izin edar/ ilegal dan pelaksanaan Operasi Pangea XIV tahun 2021, pada tanggal 27 Mei 2021 penyidik PNS (PPNS) Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya melakukan penindakan Obat Tradisional LQC tanpa izin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

edar / ilegal yang diedarkan oleh 2 (dua) toko *online* di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Adapun modus peredaran LQC ilegal tersebut yakni diedarkan melalui situs *e-commerce* dan toko *offline*. Dari hasil penindakan ditemukan Lianhua Qinwen tanpa izin edar/ ilegal sejumlah 3044 pcs, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Obat dan Makanan sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

8. **Layanan Publik Semakin Prima Dengan Kolaborasi Layanan Publik Lintas Sektor**

Guna memberikan pelayanan publik terbaik bagi warga Jakarta", itulah melandasi sinergisme antara Balai Besar POM di Jakarta (BBPOM di Jakarta) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas DMPTSP) langkah konkret yang diambil adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Persyaratan Perizinan Pada Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh 310 (tiga ratus sepuluh) peserta baik petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) maupun Petugas Call Centre Dinas DMPTSP. Harapan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan semakin banyaknya ujung tombak pemberi layanan public yang mendapatkan edukasi tentang persyaratan perizinan maka pemberian layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat utamanya UKM di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Pandemi Tidak Menyurutkan Langkah Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Seribu.

Kepulauan Seribu merupakan salah satu wilayah cakupan pengawasan Balai Besar POM di Jakarta yang ditempuh melalui transportasi laut. Kondisi pandemi tidak menyurutkan langkah Inspektur Balai Besar POM di Jakarta untuk tetap melakukan pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan pengujian *rapid antigen* terlebih dahulu untuk semua petugas yang melakukan pengawasan. Pengawasan telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2021 di wilayah Kepulauan Seribu Utara dan Kepulaun Seribu Selatan yang mencakup pengawasan sarana Produsen Pangan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); sarana pelayanan kefarmasian yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, serta sarana retail Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan termasuk juga intensifikasi pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian.

Hasil pengawasan sarana Obat dan Makanan di Pulau Kelapa 1, Kelapa 2, Harapan, Pramuka, Lancang, dan Untung Jawa dengan total terperiksa 156 (seratus lima puluh enam) sarana dengan rincian 101 (seratus satu) sarana Memenuhi Ketentuan dan 55 (lima puluh lima) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan dilakukan pembinaan teknis bekerjasama dengan petugas Suku Dinas Kesehatan dan Pendamping UMKM dari Suku Dinas PPKUKM Kepulauan Seribu termasuk intervensi dan pendampingan dalam pemenuhan langkah perbaikan dan pencegahan dalam pengelolaan vaksin Covid-19 di RSUD dan Puskesmas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Layanan Langsung Kepada Pelaku Usaha dengan Desk CAPA.

Memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui *desk CAPA* itulah langkah nyata dari Pelayanan Prima yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta. Kegiatan yang secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jakarta ini dalam rangka percepatan penerbitan rekomendasi Pemeriksaan Sarana Balai untuk produsen pangan, Importir Pangan, Importir Kosmetika, Penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), dan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Pada kesempatan ini 24 (dua puluh empat) sarana mengikuti kegiatan desk CAPA yang terselenggara pada triwulan kedua tahun 2021. Drs, Safriansyah., Apt., M.Kes dalam arahannya menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah waktu yang berharga bagi sarana atau pelaku usaha untuk mendiskusikan temuan yang belum dinyatakan *closed.* Agar proses penerbitan rekomendasi yang akan digunakan sebagai syarat mendaftarkan akun ataupun sebagai syarat penerbitan sertifikat dalam segera diperoleh.

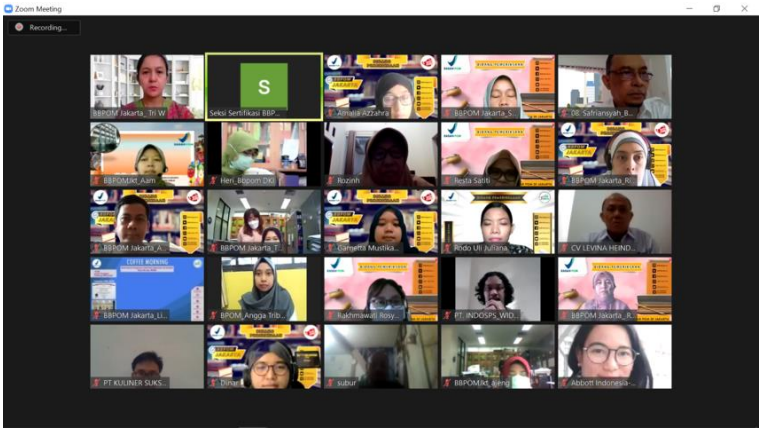

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

HIGHLIGHT KINERJA iii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR.....xvi

DAFTAR LAMPIRAN xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 4
1.4 Isu Strategis 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis..... 17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 33
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 38

BAB III AKUNTABILITAS 42
3.1 Uraian Singkat Rencana Strategis..... 43

BAB IV PENUTUP 142
4.1 Kesimpulan..... 142
2.2 Saran..... 142

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta..... 11
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024 20
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 33
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 35
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 39
Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja 42
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II..... 43
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 49
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 53
Tabel 10. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 56
Tabel 11. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 58
Tabel 12. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta 62
Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 65
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 67
Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 69
Tabel 16. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 72

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta 76
Tabel 18. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 79
Tabel 19. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 87
Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan 89
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021 92
Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021 94
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021 97
Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 100
Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 102
Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021 105
Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 109
Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 113
Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021 115
Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 118
Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji 122

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 32. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 124
Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP 125
Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 127
Tabel 35. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021..... 129
Tabel 36. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2021 131
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021 135
Tabel 38. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan II tahun 2021 138
Tabel 39. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta..... 140

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta 4
Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2021 8
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta 9
Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 10
Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta 19
Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta..... 23
Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018-2021 61
Gambar 8. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat..... 64
Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan tahun 2020 69
Gambar 10. Perbandingan Persentase Keputusan atau Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2021 74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 11. Perbandingan Persentase Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021..... 78
Gambar 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021 82
Gambar 13. Perbandingan persentase realisasi dan capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 89
Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024 143
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium Triwulan II Tahun 2021 147
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan II Tahun 2021 161
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Triwulan II Tahun 2021 169

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. **Tugas Pokok Balai Besar POM di Jakarta**

   Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Fungsi Balai Besar POM di Jakarta**

   a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
   c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
   d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
   e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
   f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
   g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
   h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
   i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
   l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

a. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

   1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
   2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
   3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

   Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

   1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
   2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

   Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Substansi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh *(sampling)* Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan.

Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh *(sampling)* produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. **Substansi Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:
   1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
   3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
   1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
   4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
   5. Pelaksanan urusan kepegawaian;
   6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
   7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
   8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

   Bagian Tata Usaha terdiri atas:
   1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
   2. Subkelompok Substansi Umum; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.

   Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1.4. Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Berikut adalah aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta:

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 119 orang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2**. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

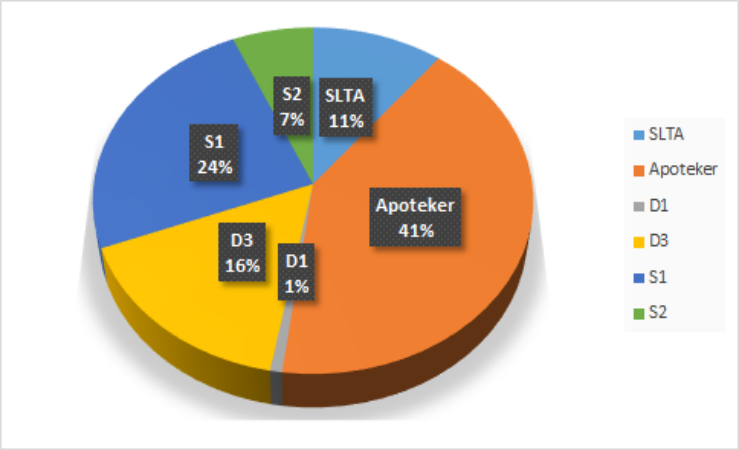

Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 15 Juli 2021

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m^2 dan luas bangunan 2.404,00 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Program laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017.

4. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ sebesar Rp 46.199.752.000,- (empat puluh enam milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca), industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional,Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen

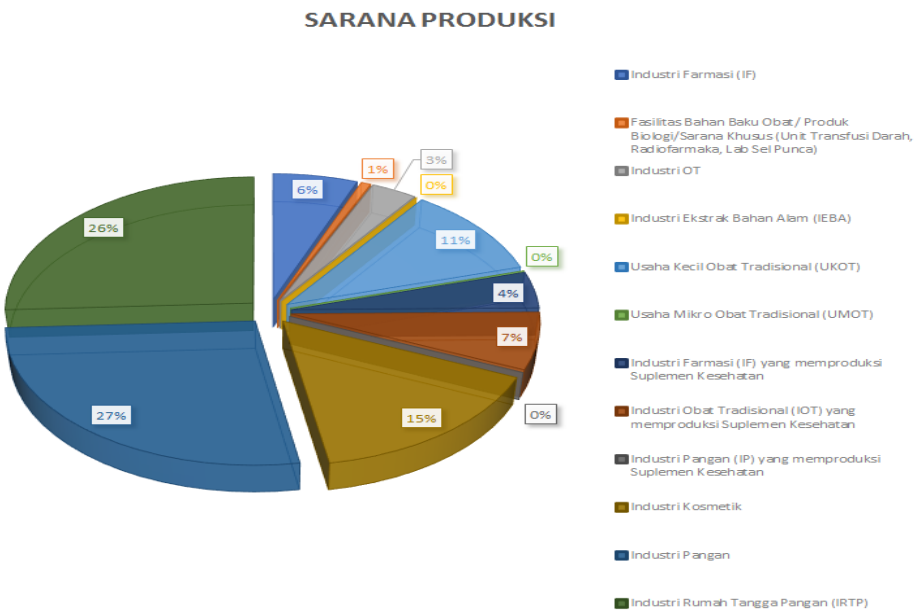

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kesehatan,Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, GInstalasi Sediaan Farmasi/Instalasi, Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Klinik, Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan, Fasilitas Distribusi Kosmetik, Fasilitas Distribusi Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada **Gambar 4** di bawah ini.

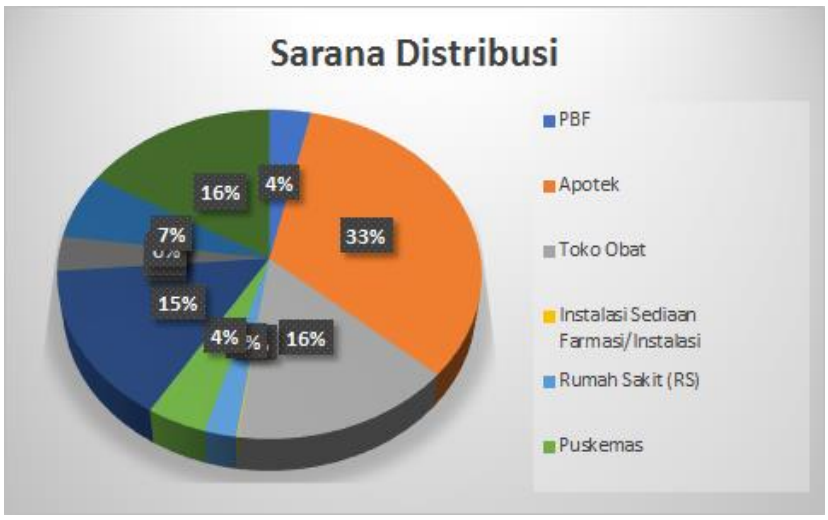

Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta

KEKUATAN	KELEMAHAN
- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM	- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien - Masih memerlukan waktu yang lama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEKUATAN	KELEMAHAN
di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komperehensif mencakup *premarket* dan *postmarket* - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - *Mobile lab* dan mini laboratorium - Integritas pelayanan publik - Fasilitas laboratorium yang memadai - Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media *online*, cetak dan media sosial - Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha - Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum, - Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai - *Networking* yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah - Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017 - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015	dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana belum optimal - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes
PELUANG	**TANTANGAN**
- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan *e-commerce* ke depan cukup besar	- Semakin maraknya penjualan obat dan makanan *online* - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEKUATAN	KELEMAHAN
- Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara *online* - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceoat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan	- Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk *lifestyle* - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan - Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi *hoax* terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk illegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

online berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

   Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Hoaks terkait Obat dan Makanan**

   Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. **Reformasi Birokrasi**

   Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

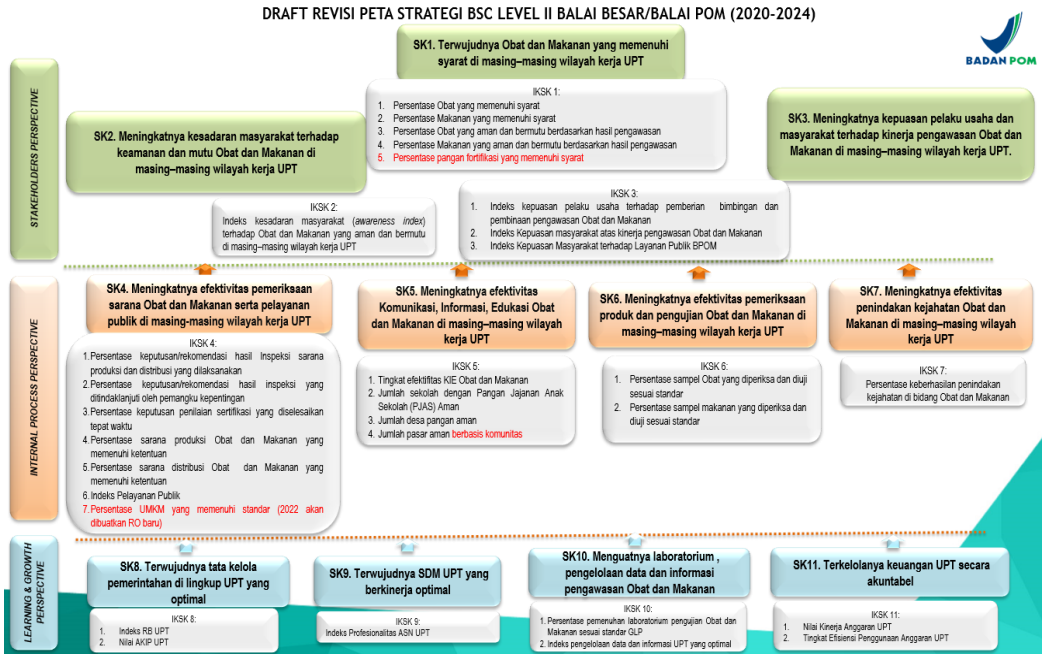

Gambar 5. Peta Strategi *BSC* Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel 2 berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							
	Stakeholder						
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65
	Learning and Growth						
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:

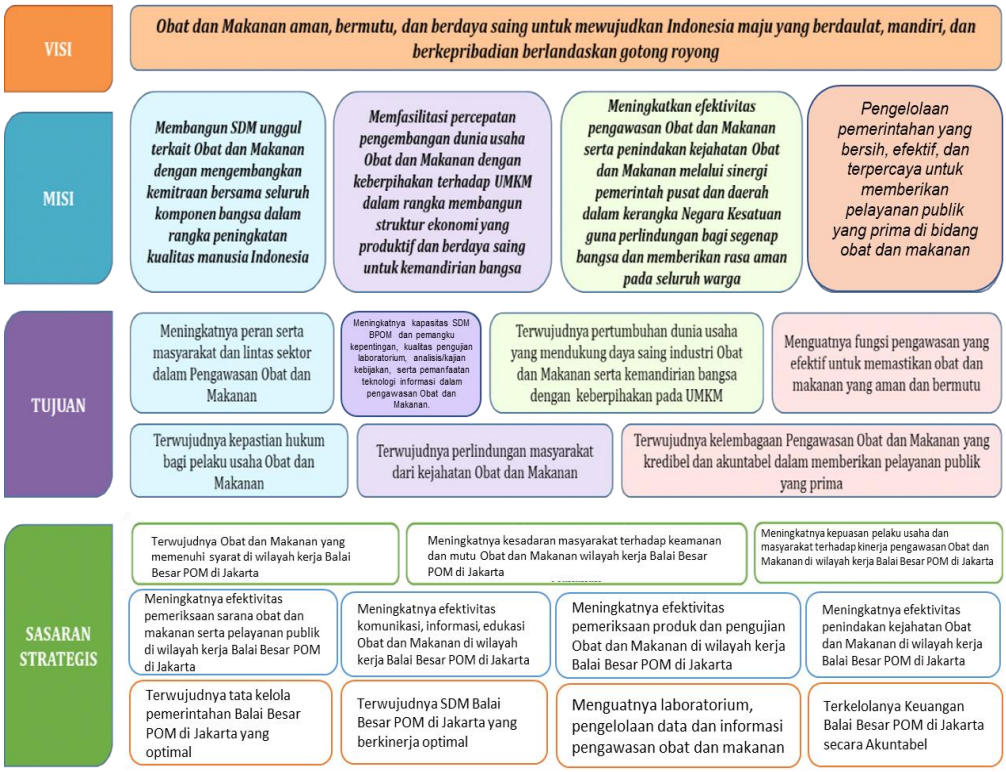

Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

***Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)*:**

a. **Sasaran Strategis 1:** ***Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

   Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang di*sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

(1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 86,5%

(2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%

(3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 86,5%

(4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 78,5%

b. Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 75 pada akhir tahun 2021.**

c. **Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

(1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di tahun 2021;

(2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 74 di tahun 2021; dan

(3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 88,4 di tahun 2021.

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective):

a. Sasaran Strategis 4: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum)* mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

(1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89% pada akhir tahun 2021;

(2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 60,2% pada akhir tahun 2021;

(3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 85% pada akhir tahun 2021;

(4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target pada 48% akhir tahun 2021;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 57% pada akhir tahun 2021; dan**
(6) **Indeks pelayanan publik, dengan target 3,76 pada akhir tahun 2021.**

b. **Sasaran Strategis 5:** ***Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

(1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 90,99 pada akhir tahun 2021;**
(2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 pada akhir tahun 2021;**
(3) **Jumlah desa pangan aman dengan target 14 pada akhir tahun 2021; dan**
(4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 2 pada akhir tahun 2021**

c. **Sasaran Strategis 6:** ***Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta***

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

(1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90,5% pada akhir tahun 2021; dan

(2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 89,5%pada akhir tahun 2021.

d. Sasaran Strategis 7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 40% pada akhir 2021.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Perspektif Pembelajaran (Learning and Growth Perspective):

a. Sasaran Strategis Ke-8: *Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021; dan

(2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021.

b. **Sasaran Strategis 9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal***

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 77 di tahun 2021.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. **Sasaran Strategis Ke-10:** ***Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan***

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*.

Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

(1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 75% pada 2021; dan

(2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. **Sasaran Strategis 11: *Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel***

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

(1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 94 sebesar pada tahun 2021; dan

(2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target Efisien (95%) pada tahun 2021.

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2021

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,4
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,76
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		17-Jumlah desa pangan aman	14
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,5
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	85
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 47.430.798.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja	05-Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Balai Besar POM di Jakarta		
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,4
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,76
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		17-Jumlah desa pangan aman	14
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,5
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	kerja Balai Besar POM di Jakarta		
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	85
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana aksi perjanjian menjabarkan target kinerja triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II Tahun 2021.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B06		Capaian (%)	KRITERIA	Anggaran B06		Capaian (%)
				Target	Realisasi			Target	Realisasi	
a	b	c	d	e	f	g=(K6/D6*100)	h	i	j	k=(i/h*100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,50%	86,50%	79,23%	91,60	Baik	459.504.850	87.624.440	19,07
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80,00%	96,02%	120,03	Tidak Dapat Disimpulkan	269.862.250	44.411.474	16,46
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,50%	86,50%	72,78%	84,14	Cukup	459.504.850	87.624.440	19,07
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,50%	78,50%	74,02%	94,29	Baik	269.862.250	44.411.474	16,46
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	189.354.990	57.206.855	30,21
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	113.559.800	23.084.918	20,33
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	189.354.990	57.206.855	30,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	90,5	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	2.834.530.500	41.974.000	1,48
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89,00%	86,03%	96,66	Baik	283.899.500	57.712.296	20,33
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2%	60,20%	80,90%	134,39	Tidak Dapat Disimpulkan	283.899.500	57.712.296	20,33
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85,00%	94,32%	110,96	Sangat Baik	272.400.000	39.200.000	14,39
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	48,00%	63,98%	133,29	Tidak Dapat Disimpulkan	103.968.000	13.477.120	12,96
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57,00%	83,50%	146,49	Tidak Dapat Disimpulkan	350.271.200	78.862.553	22,51
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	4,2	4,2	4,54	108,10	Baik	195.093.020	58.940.396	30,21
5		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	90,99	93,59	102,86	Baik	1.774.000.000	1.468.862.800	82,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B06		Capaian (%)	KRITERIA	Anggaran B06		Capaian (%)
				Target	Realisasi			Target	Realisasi	
a	b	c	d	e	f	g=(K6/D6*100)	h	i	j	k=(i/h*100)
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	45% (progress)	50% (progress)	111,11	Sangat Baik	641.506.000	228.923.400	35,69
		Jumlah desa pangan aman	14	45% (progress)	45% (progress)	100,00	Baik	1.014.429.000	182.956.500	18,04
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	60% (progress)	70% (progress)	116,67	Sangat Baik	100.431.000	41.417.000	41,24
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5	36,00%	32,43%	90,08	Baik	393.861.300	75.106.663	19,07
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,5	36,00%	41,05%	114,03	Sangat Baik	231.310.500	38.066.978	16,46
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40%	20,00%	24,91%	124,55	Tidak Dapat Disimpulkan	1.758.622.000	682.078.295	38,78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	90	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	330.470.500	91.725.976	27,76
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	620.370.000	213.553.823	34,42
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	23.342.370.000	12.225.531.167	52,37
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar *GLP*	75	-	-	Target Tahunan	Data dari Badan POM	8.667.648.500	856.756.961	9,88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2,0	1,7	85,00	Cukup	98.827.000	-	-
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94	37			NKA=(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	330.470.500	91.725.976	27,76
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	95,00%	75,00%	78,95	Cukup	620.370.000	213.553.823	34,42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \, \boldsymbol{Capaian} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}} \times \textbf{100\%}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	x > 120%	
Sangat Baik	110% < x ≤ 120%	
Baik	90% ≤ x <110%	
Cukup	70% ≤ x < 90%	
Kurang	50% ≤ x < 70%	
Sangat Kurang	< 50%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2021 Triwulan II Balai Besar POM di Jakarta belum semua sasaran strategis dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya.

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	97,52	Baik
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	121,65	Tidak dapat disimpulkan
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	107,84	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	102,06	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	124,55	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	85	Cukup
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	79% Efisien	Cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Sasaran strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,50%	79,23%	91,60	**Baik**
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	96,02%	120,03	**Tidak Dapat Disimpulkan**
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,50%	72,78%	84,14	**Cukup**
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,50%	74,02%	94,29	**Baik**
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	86,03%	96,66	**Baik**
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2%	80,90%	134,39	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	94,32%	110,96	**Sangat Baik**
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	63,98%	133,29	**Tidak Dapat Disimpulkan**
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	83,50%	146,49	**Tidak Dapat Disimpulkan**
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,2	4,54	108,10	**Baik**
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	94,27	103,60	**Baik**
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	45% (progress)	50% (progress)	111,11	**Sangat Baik**
	Jumlah desa pangan aman	45% (progress)	45% (progress)	100,00	**Baik**
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	60% (progress)	70% (progress)	116,67	**Sangat Baik**
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,00%	32,43%	90,08	**Baik**
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36,00%	41,05%	114,03	**Sangat Baik**
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20,00%	24,91%	124,55	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	Target Tahunan	**Data dari Badan POM**
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,0	1,7	85,00	**Cukup**
11. Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	37	-	-	**NKA=(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)**
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	95,00%	75,00%	78,95	**Cukup**

*) dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori "**baik**" (90% ≤ x <110%); 3 (tiga) indikator mencapai kategori "**cukup**" (70% ≤ x < 90%); 5 (lima) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori "**tidak dapat disimpulkan**", 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori "**sangat baik**" (110% ≤ x <120%).

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. **Persentase obat yang memenuhi syarat**

   a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

   Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86,5	86,5	79.23	91,60	**Baik**

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Obat yang di*sampling* sesuai dengan pedoman *sampling* tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

(1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
(2) Produk kedaluwarsa
(3) Produk rusak
(4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
(5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\%\ Obat\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Total\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji} x\ 100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yaitu **91,06%** dengan kriteria "**Baik**".

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TW I dan TW II tahun 2021*

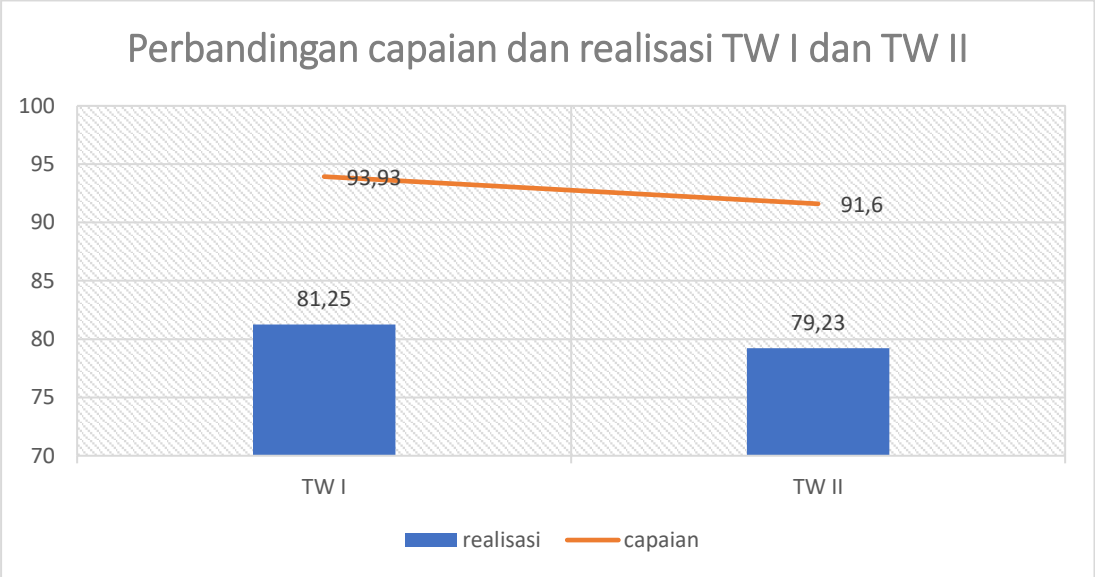

Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Presentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II ini mengalami penurunan dibanding Triwulan I, namun meningkat dibanding capaian tahun 2020. Terdapat 20.77% hasil evaluasi penandaan sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan, yang terbanyak adalah sampel kosmetik dan obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tradisional. Hal ini memerlukan perhatian khusus supaya pelaku industri selalu mematuhi ketentuan penandaan ini.

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik *(GMP)* sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten serta peningkatan kompetensi personil sehingga hasil uji selalu dapat dijamin validitasnya. Selain itu juga dilakukan pengembangan metode analisis yang sesuai dengan trend produk beredar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 1. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
PersentaseMakanan yang MemenuhiSyarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	80	80	96.02	120.03	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

(1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
(2) Produk kedaluwarsa
(3) Produk rusak
(4) Tidak memenuhi ketentuan label
(5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk kriteria 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel makanan yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Makanan\ MS}{Total\ Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Keterangan:
a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 120.03 % dengan kriteria **"tidak dapat disimpulkan".**

b. *Perbandingan realisasi dan capaian TWI dan TW II tahun 2021*

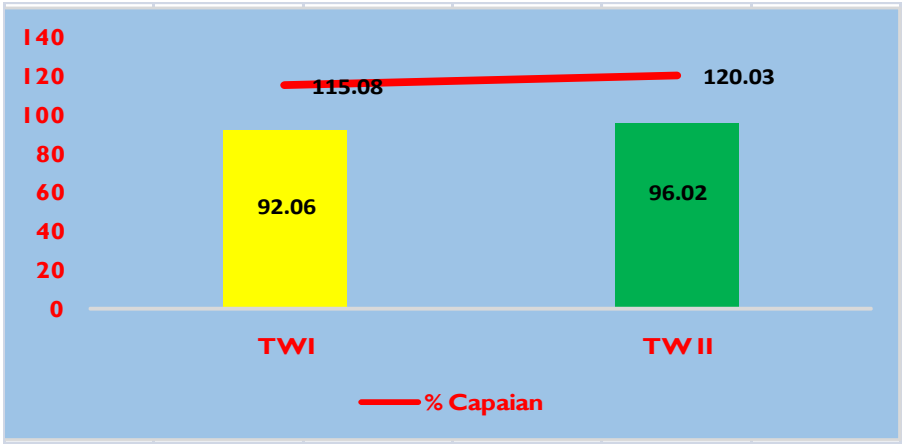

Gambar 1. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan capaian di Triwulan I tahun 2021, keduanya masuk dengan kriteria sangat baik. Indikator capaian dihitung terhadap hasil sampling acak dibandingkan jumlah sampel yang diperiksa.

c. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

- Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada TW II tahun 2021 sudah mencapai target dengan kriteria sangat baik. Meskipun realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sudah mencapai target dengan kriteria sangat baik, jumlah produk yang tidak memenuhi syarat terbanyak adalah dari produk madu. Produk madu perlu mendapat perhatian khusus guna menjamin produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan.
- Meningkatnya capaian pada TW II disebabkan penetapan target tahun 2021 ditingkatkan, namun penetapan target tahun 2021 sudah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten serta peningkatan kompetensi personil sehingga hasil uji selalu dapat dijamin validitasnya. Selain itu juga dilakukan pengembangan metode analisis yang sesuai dengan trend produk beredar.

Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan melaksanakan kegiatan berikut :

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dengan pedoman

- Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

- Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5	86,5	72,78	84,14	**Cukup**

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\text{Obat MS} = \frac{\textit{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\textit{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} x100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 Triwulan II yaitu 84,14% dengan kriteria "**Cukup**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. *Perbandingan capaian dan realisasi TW I dan TW II*

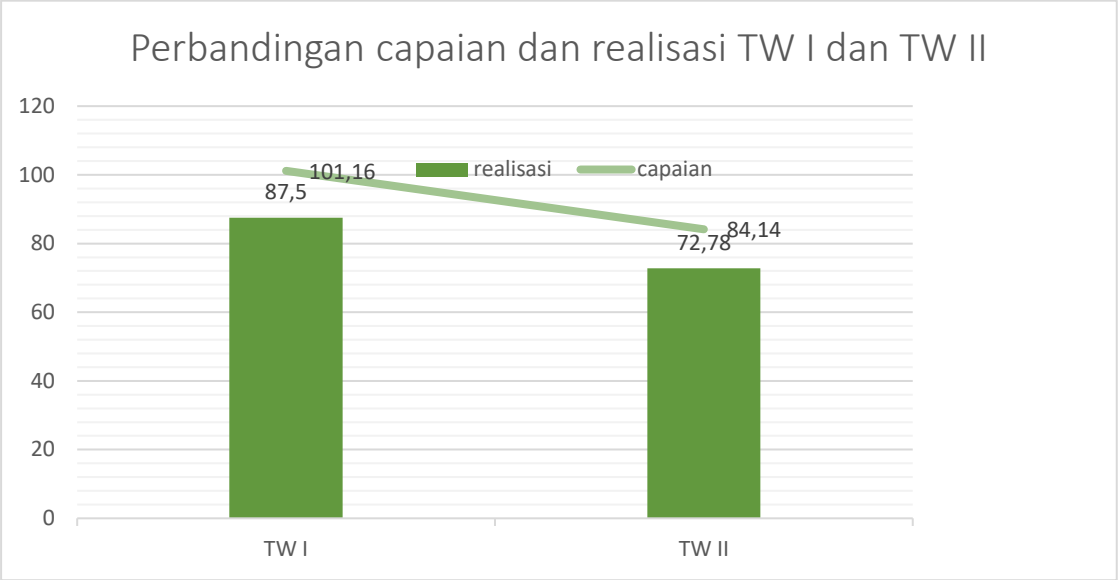

Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu pada Triwulan II tahun 2021 mengalami penurunan dibanding Triwulan I, masih belum memenuhi target. Ditemukan 25.21% sampel (sebagian besar sampel kosmetik) yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 2.01% sampel tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi yaitu sampel kosmetik dengan nilai angka lempeng total di luar rentang.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Hal ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta masih ada yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu serta ketentuan penandaan. Banyaknya sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan pendaftaran produk kosmetik hanya melalui notifikasi tanpa melalui evaluasi premarket yang komprehensif.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang aman dan bermutu, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik *(GMP)* sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten serta peningkatan kompetensi personil sehingga hasil uji selalu dapat dijamin validitasnya. Selain itu juga dilakukan pengembangan metode analisis yang sesuai dengan trend produk beredar.

Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

1. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi obat untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP),* termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
2. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Obat untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.

4. <u>Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta</u>

b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel2. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	78.5	78.5	74.20	94.29	**Baik**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

$$\% \, Makanan \, MS = \frac{Jumlah \, Sampel \, Targeted \, MS}{Total \, Sampel \, Targeted \, yang \, Diperiksa \, dan \, Diuji} \, x \, 100\%$$

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta triwulan II tahun 2021 sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 94,29% dengan kriteria**"baik".**

c. *Perbandingan realisasi dan capaian TWI dan TW II tahun 2021*

Indikator kinerja utama "Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2021. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Untuk capaian triwulan II tahun 2021 terdapat sedikit penurunan dibanding capaianTW I tahun 2021, namun masih masuk dalam kriteria "**baik**".

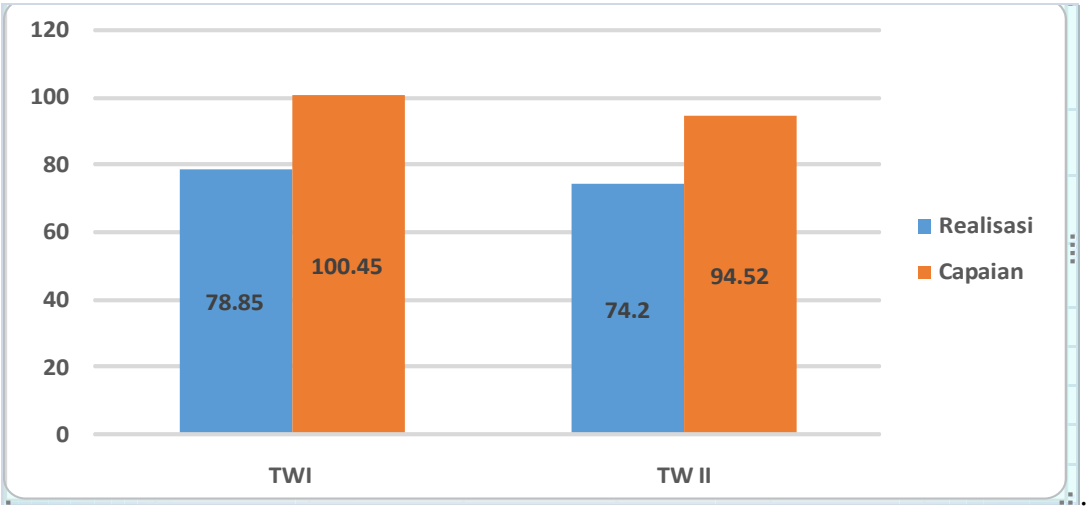

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gambar 2. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW II dengan TW I tahun 2021

d. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW II tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 94.29% dengan kriteria baik. Untuk TW II dan TW I 2021, pemeriksaan sampel Makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Persentase Makanan yang aman dan bermutu di tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih melebihi target yang ditetapkan.

e. *Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada TW II tahun 2021 belum mencapai target dan menurun dibanding capaian Triwulan I tahun 2021, namun dengan kriteria baik. Yang menyebabkan belum tercapainya target ini adalah masih ada produk hasil sampling targeted yang tidak memenuhi syarat uji maupun ketentuan penandaan. Perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha guna menjamin produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan.

f. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya.*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten serta peningkatan kompetensi personil sehingga hasil uji selalu dapat dijamin validitasnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. Dengan demikian ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya, hal ini juga akan mendukung terjaminnya validitas uji. Selain itu juga dilakukan pengembangan metode analisis yang sesuai dengan trend produk beredar.

Namun karena yang banyak menyumbang rendahnya capaian ini adalah banyaknya sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, maka pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan perlu menjadi prioritas untuk dilakukan secara terus menerus. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

$$NPS = \frac{91.60\% + 120.03\% + 84.14 + 94.29\%}{4}$$

$$NPS = 97.52\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dengan NPS 97.52%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

5. **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

   a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 3. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	78	-	-	-	-

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku.

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produdk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan *size* jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/perdesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematik sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan termasuk dalam Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT) dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) sebanyak 1157 blok sensus. Setiap blok sensus berjumlah 10 responden dan total berjumlah 11570 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel telah dilakukan pengacakan oleh pihak BPS sehingga tingkat keterwakilan dan keacakan (*random*) sampel sangat tinggi. Untuk responden rumah tangga, unit sampling terkecil dalam survei ini adalah rumah tangga sesuai Blok Sensus BPS. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	**Interval Indeks**
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \, x \, 100, \text{ dengan } i=1,2, \ldots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke-i

I_{min} = skor faktor minimal

I_{maks} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi dan capaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai target indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2020 dengan kriteria sangat baik.

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 ialah sebesar 82.53 (baik) dengan rincian indeks pengetahuan 83.38 (baik), indeks sikap 84.87 (baik) dan indeks perilaku 79.35 (baik). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi sudah baik.

Pada tahun 2021 ini, target yang ditetapkan adalah 78, sehingga harus ada upaya untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memperbanyak kegiatan KIE dan penyebaran informasi kepada masyarakat, terutama melalui pemanfaatan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter*, dan *Youtube*). Terlebih hal ini sangat efektif mengingat adanya pengalihan beberapa program KIE dari sebelumnya tatap muka menjadi daring di tengah situasi pandemi Covid-19 di tahun 2021 ini. Upaya ini akan terus ditingkatkan ke depannya, sehingga dapat menyasar berbagai kalangan masyarakat dan meningkatkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masa mendatang.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

6. <u>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</u>

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 12. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2021	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Melalui survei dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10%.

Kriteria yang digunakan adalah:

Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):

$$Indeks = (I_i - I_min)/(I_maks - I_min) \ x \ 100, \text{ dengan } i=1,2, \ldots, n.$$

Keterangan

I_i	=	skor faktor ke-i
I_min	=	skor faktor minimal
I_maks	=	skor faktor maksimal
n	=	banyaknya responden

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan triwulan dua tahun 2021 sebesar 89,01 dari target yang ditetapkan sebesar 84, sehingga capaian Indeks kepuasan pelaku usahan terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makann triwulamn dua tahun 2021 adalah 105,96 dengan nilai sangat baik

Adapun responden dari indeks tersebut adalah pelaku usaha UMKM

b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemebrian bombingan dan pembinaan pengwasan Obat dan Makanan triwulan 1 tahun 2021 sebesar 89,01 melampaui target tahun 2021 dan juga melampaui capaian tahun 2020 sebesar 85,53. Capaian ini diperoleh dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah responden sebanyak 684(enam ratus delapan puluh empat)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung tercapainya target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta adalah dengan melakukan upaya pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui kuliah yang diselenggarakan secara daring maupun langsung kepada UMKM yang difasilitasi tahun 2021 produksi pangan. Dengan upaya ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

diharapkan capaian nilai pada triwulan dua tahun 2021 tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 4. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah hasil pengukuran dari survei berupa angka dari hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan termasuk produk layanan yang diawasi BPOM. Indikator pembentuk terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu: (1) *Reliability,* kemampuan pengawasan Obat dan Makanan; (2) *Assurance,* kemampuan memberikan perlindungan; (3) *Tangible*, layaan informasi tentang keamanan produk; (4) *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman; (5) *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya. Lingkup pertanyaan kuesioner kepuasan masyarakat meliputi kepuasan terhadap kinerja dan layanan BPOM serta pertanyaan tambahan terkait Covid-19.

Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

error 10%. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan.

Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	**Interval Indeks**
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus :

$$Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \, x \, 100, \text{ dengan } i=1,2, \ldots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke-i

I_{min} = skor faktor minimal

I_{maks} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi dan capaian.

b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai target indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2020 dengan kriteria baik.

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 adalah 73.3 (Cukup Baik).

Target kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 ialah 75. Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

penguatan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Penerapan dan peningkatan inovasi pelayanan publik juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektifitas KIE yang akan berdampak pada tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 5. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90.5	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	**Interval Indeks**
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \, x \, 100, \text{ dengan } i=1,2, \ldots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke-i

I_{min} = skor faktor minimal

I_{maks} = skor faktor maksimal

n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi dan capaian.

b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Hasil indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 masuk kategori Baik yaitu dengan realisasi sebesar 88.19. Target kinerja indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 ini ialah 90.5, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja. Rencana aksi yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

publik BBPOM di Jakarta serta sekaligus menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan target diperolehnya predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022 adalah meningkatkan inovasi pelayanan publik serta sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada, antara lain:

1) Layanan Informasi dan Pengaduan

Untuk meningkatkan layanan informasi dan pengaduan, diperlukan upaya antara lain implementasi inovasi pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan *subsite* BBPOM di Jakarta, dan penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai, seperti adanya nomor antrean dan pengadaan e-kios sebagai media informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.

2) Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Untuk meningkatkan Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga, diperlukan upaya seperti penyediaan fasilitas pembayaran PNBP secara *cashless* di kantor BBPOM di Jakarta, informasi prosedur, tarif, dan waktu layanan serta penyediaan aplikasi pemantauan secara daring yang memudahkan proses pemberian layanan.

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

9. <u>Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 17. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW 2 2021	REALISASI	CAPAIA NTW 2 2021 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	86,03	96,66	**BAIK**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Pelaku usaha;

Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

(1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

(2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

(3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

(4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW 2 tahun 2021 kurang dari target yang ditetapkan. Dari 4 rekomendasi yang menjadi bagian indikator kinerja ini, 3 rekomendasi yaitu rekomendasi dari UPT sendiri, Pusat, dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan BBPOM di Jakarta telah mencapai 100% capaian, namun untuk rekomendasi dari UPT sendiri yang ditindaklanjuti oleh Pusat hanya 36.5% sehubungan masih kurangnya tindak lanjut dari pusat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang disampaikan ke BBPOM di Jakarta maupun tembusan suratnya. Kurangnya persentase 1 rekomendasi tersebut mengakibatkan capaian kurang dari target (96.66%).

Diperlukan adanya peningkatan koordinasi dengan unit teknis di BPOM terkait rekomendasi / laporan hasil inspeksi yang disampaikan kepada ybs dari Januari hingga Juni 2021 dan penyampaian surat permintaan respon atau tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan.

b. *Perbandingan Capaian TW I dengan TW II Tahun 2021*

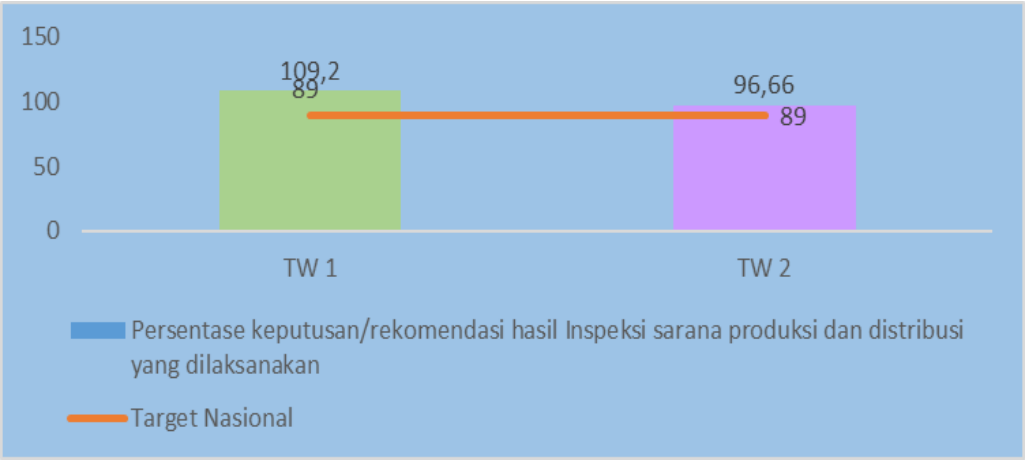

Gambar 18. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara TW 1 dan TW 2

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada TW 2 **menurun** dibandingkan dengan TW 1 yakni dengan kriteria "BAIK" (tetapi belum ada penurunan berarti dari TW 1). Hal ini disebabkan masih kurangnya respon dari pusat terhadap surat rekomendasi dari BBPOM di Jakarta.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Masih kurangnya capaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan. Sehingga data masih berjalan hingga akhir tahun dengan bertambahnya surat tindak lanjut yang dikirim ke pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan.
- Kurangnya respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta. Penyebab kurangnya respon tersebut adalah karena rekomendasi atau laporan BBPOM di Jakarta ke pusat belum banyak respon pusat yang diterima oleh BBPOM di Jakarta

  Untuk solusi yang dibuat adalah :

  ✔ Mengetatkan timeline pembuatan tindak lanjut dari hasil pengawasan

  ✔ Melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindaklanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2021*

Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW 2 2021	REALISASI	CAPAIANT W 2 2021 (%)	KRITERIA
keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	60,20	60,20	80,90	134,39	**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

pelaku usaha;

lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2.

USULAN SASARAN KEGIATAN, IKU DAN TARGET TAHUN 2020-2024

BADAN POM

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75

DEFINISI

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   - pelaku usaha;
   - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

CARA PERHITUNGAN

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $\frac{A+B}{2}$

A = $\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}$ X 100%

B = $\frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepadalintas sektor}}$ X 100%

Target per balai, dapat diexercise oleh setiap Balai, namun memperhatikan:
1. **Target nasional**
2. **Target indikator BPOM yaitu: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor . Target indikator ini per balai terlampir.**

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,90 % sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 60,20%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 134,39 % dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, masih diperlukan data tambahan pada triwulan selanjutnya untuk bisa menyimpulkan hasil dari data yang sebenarnya.

Persentase capaian TW 2 tahun 2020 sebesar 48,05 % (realisasi 26,43 % dari target 55,5 %) dengan kriteria “SANGAT KURANG”, sedangkan persentase capaian TW 2 tahun 2021 sebesar 134,39 % dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”. Capaian TW 2 tahun 2021 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2020 tetapi tidak dapat disimpulkan sehingga masih diperlukan data tambahan pada triwulan selanjutnya untuk bisa menyimpulkan hasil dari data yang sebenarnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. *Perbandingan capaian TW I dengan TW 2 tahun 2021*

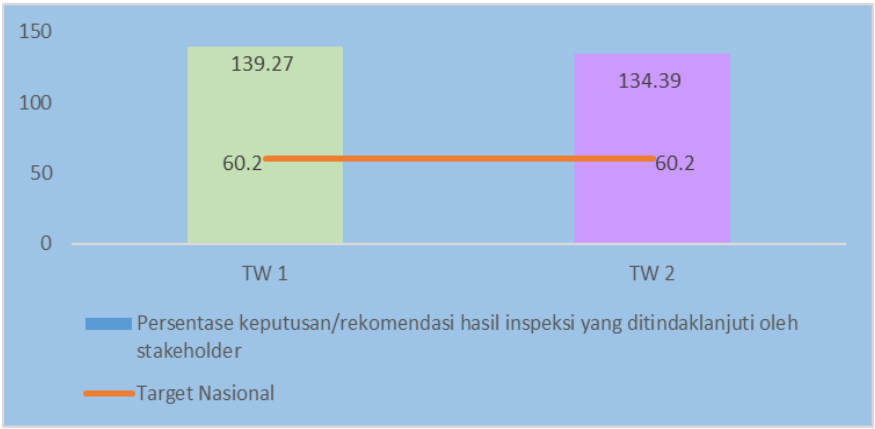

Gambar 17. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW 1 dibandingkan TW 2 tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW 2 **menurun** dibandingkan dengan TW 1. Pada TW 1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah melebihi target begitu juga dengan capaian di TW 2, tetapi tidak dapat disimpulkan sehingga masih diperlukan data tambahan pada triwulan selanjutnya untuk bisa menyimpulkan hasil dari data yang sebenarnya.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

- Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kinerjanya.
- Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, belum jalannya aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta menyebabkan belum adanya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerjaI*

- Semakin dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan retail kecil di pasar tradisional maupun pinggiran wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

11. <u>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu</u>

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 16. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	94,33	110,96	**Sangat Baik**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

(1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
(2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
(3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
(4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
(5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
(6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT/SK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(7) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*)

(8) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\textit{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \text{x}100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 94,33% dari target yang ditetapkan 85 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan dua tahun 2021 sebesar 110,97% dengan kriteria “sangat baik”. Secara umum untuk hasil capaian sampai triwulan dua ini, semua proses dalam rangka menerbitkan rekomendasi tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan dua 2021 sebanyak 301 (tiga ratus satu) yang seluruhnya memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan. Sebanyak 301 keputusan merupakan kumulatif dari penyelesaian permohonan tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2020 dan 222 (dua ratus dua puluh dua) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2021

Terdapat perbedaan definisi operasional pada keputusan Sertifikasi tahun 2021, yaitu, keputusan sertifikasi tahun 2020 adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan terhadap permohonan yang diterima tahun 2020, sedangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

keputusan sertifikasi tahun 2021 adalah jumlah permintaan tindakan perbaikan yang diterbitkan untuk permohonan yang diterima tahun 2021 dan rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2021 yang berasal dari permohonan 2020

Sampai dengan triwulan satu tahun 2021 terdapat 242 (dua ratus empat puluh dua) permohonan yang diterima di Balai Besar POM di Jakarta dan telah diterbitkan keputusan sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sehingga jumlah sarana yang prosesnya *carry over* ke triwulan berikutnya sebanyak sebanyak 20 (dua puluh). Dari 20 permohonan yang belum terbit keputusan disebabkan karena dilakukan audit di akhir bulan Juni 2021 atau belum dilakukan audit

Adapun jumlah permohonan pengujian sampel sampai triwulan kedua sebanyan 32 (tiga puluh dua) dan semunya dapat diselesaikan tepat waktu

b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi dan dari kelompok substansi infokom yang memiliki kompetensi audit.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan OLahan membuat proses yang terjadi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana Balai akan tetapi ijin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha.
2. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian ijin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. *Desk* CAPA triwulan dua 2021 diselenggarakan pada 9 Februari 2021 dan 18 Juni 2021 yang diselenggarakan secara daring dan diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan
3. Tantangan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah tentunya telah menjadi tuntutan masyarakat kini. Balai Besar POM di Jakarta sangat menyadari hal ini dan perlu didukung oleh kompetensi yang mumpuni dari setiap orang yang bertugas memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kali dilakukan pelatihan dan diseminasi oleh peserta pelatihan
4. Adanya *e-book* yang diterapkan pada tahun 2021 sehingga membantu pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan menerapkan cara produksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan distribusi yang baik pada sarananya, serta pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk diaudit sertifikasi dengan mudah.

5. Kekurangan sumber daya yang ada dapat diatasi dengan beberapa tindakan terobosan yaitu Sistem rekap sarana dan system warning terhadap pelaku usaha yang bisa disetting secara *online* sehingga tidak harus ada petugas khusus yang membuat surat satu persatu secara manual. Selain itu inovasi *e-book* Pangan membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan penerapan cara produksi dan distribusi yang baik tanpa harus antri konsultasi sehingga mengurangi antrian konsultasi dan mempercepat proses.
6. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada 22 Juni 2021 dengan narasumber utama dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang membahas tentang peetapan kategoi pangan dengan peserta pelaku usaha yang difasilitasi oleh BBPOM di Jakarta
7. Kegiatan Bimtek yang diberikan kepada petugas AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) dan petugas call center Dinas DMPTSP yang diselanggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2021
8. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling (Kerling) dengan tujuan mendekatkan akses layanan publik kepada masyarakat yang pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Timur
9. Kegiatan desk registrasi yang diselanggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 25 Juni 2021 untuk membantu pelaku usaha dalam memperoleh nomor izin edar.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

1. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
2. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Kekurangan sumber daya dari petugas Balai POM di Jakarta juga membuat pelayanan kurang optimal karena beban kerja yang berlebih.

Untuk peningkatan kinerja triwulan berikutnya akan dikembangkan beberapa hal :

a. Akan terus dilakukan program *desk CAPA* yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya *desk CAPA* akan diselenggaran secara daring. Adapun sasaran *desk CAPA* adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian *CAPA*
b. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan presepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Kelompok subtansi Pemeriksaan dan Kelompok subtansi Infokom
c. Melakukan simpifikasi *SOP* dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi dan penyesesuaian dengan peraturan terbaru
d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik
e. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2019 telah dilakukan reviu Renstra 2021 - 2024 seiring dengan terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12. <u>Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.</u>

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 20. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW 2 2021	REALISASI	CAPAIANTW 2 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	48	48	63,98	133,28	**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

USULAN SASARAN KEGIATAN, IKU DAN TARGET TAHUN 2020-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70

DEFINISI

Sarana Produksi Obat
Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).
✓ **Memenuhi Ketentuan** adalah apabila **tidak ada temuan kritikal** pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT
Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila:
✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.
Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik
Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.
✓ Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan
Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.
✓ Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan
Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan **Memenuhi Ketentuan** apabila:
✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.
Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

CARA PERHITUNGAN

Nilai Persentase = $\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$

Catatan:
Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

Target per balai, dapat diexercise oleh setiap Balai, namun memperhatikan target nasional yang sesuai dengan RPJMN

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta **sudah melebihi target**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang ditetapkan yaitu 133,28% dengan kriteria "**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**", tetapi hal ini belum dapat disimpulkan sehingga masih diperlukan data tambahan pada triwulan selanjutnya untuk bisa menyimpulkan hasil dari data yang sebenarnya.

b. *Perbandingan capaian TW 1 dengan TW 2 tahun 2021*

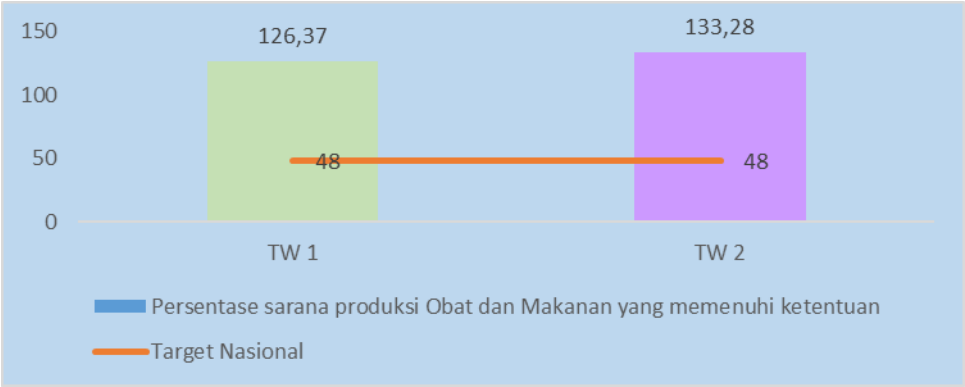

Gambar 17. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW 1 tahun 2021 dibandingkan TW 2 tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW II (kriteria "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN") **meningkat** dibandingkan dengan TW I (kriteria "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN"). Hal ini disebabkan banyaknya sarana produksi yang "memenuhi ketentuan" yang diperiksa di TW 2 tahun 2021 ini.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 133,28% **sudah melebihi target** yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	6	4	2
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	3	1	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	2	1	1
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	19	13	6
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	36	26	10
11.	Industri Pangan	48	36	12
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	46	21	25
TOTAL		161	103	58

Kegagalan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Pemeriksaan sarana produksi UMKM tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu.
3. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya
4. Capaian memenuhi ketentuan lain yang masih kurang yaitu pada sarana fasilitas produk biologi/sarana khusus seperti sel punca, hal ini karena sarana tersebut masih belum melakukan aktivitas sesuai standar Cara Produksi Obat Yang Baik, dimana masih proses asistensi/pembimbingan untuk mendapatkan sertifikat CPOB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.
2. Melakukan pertemuan secara intens dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk menegaskan lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemberian ijin sarana terutama untuk Industri Rumah Tangga Pangan sehingga yang diberi Ijin adalah yang benar-benar memenuhi kriteria sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan, misalnya untuk produk yang tidak bisa diproduksi oleh Industri rumah tangga pangan seperti olahan daging, *frozen food*, minuman untuk tidak dikeluarkan lagi ijin PIRTnya dan diarahkan untuk mendaftarkan produk ke Badan POM untuk mendapatkan MD sehingga pengendalian cara produksi yang baik akan meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✔ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Hal ini dari 2 tahun terakhir sudah diusulkan untuk revisi form 166 pemeriksaan sarana produksi pangan. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 62 untuk UMKM akan tetapi form ini belum dapat dimplementasikan karena belum final dan belum disahkan.
- ✔ Kemampuan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya:

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dan Koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait di pusat dan secara aktif mengusulkan solusi permasalahan form pemeriksaan sarana produksi pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Peningkatan kompetensi petugas Pembina Industri Rumah Tangga Pangan pada suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah DKI Jakarta sehingga akan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan sendirinya akan menurunkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA* (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 2 tahun 2021, capaian melebihi dari target yang ditetapkan, tetapi dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Sehingga dengan hasil ini sebenarnya belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

13. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW 2 2021	REALISASI	CAPAIANT W 2 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	57	57	83,50	146,49	**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

USULAN SASARAN KEGIATAN, IKU DAN TARGET TAHUN 2020-2024

BADAN POM

NO.	SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71

DEFINISI	CARA PERHITUNGAN
a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK (juklak.....) 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	% Sarana Distribusi MK = $\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}}$ X 100%

Target per balai, dapat diexercise oleh setiap Balai, namun memperhatikan target nasional yang sesuai dengan RPJMN

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
(2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
(3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
(4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 55% dengan kriteria "Baik". Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 58,73 % sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan POM.

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2020-2024 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat menyebabkan realisasi TW 2 tahun 2021 **meningkat** dibandingkan TW 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil meningkatkan** persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional.

b. *Perbandingan capaian TW 1 dengan TW II tahun 2021*

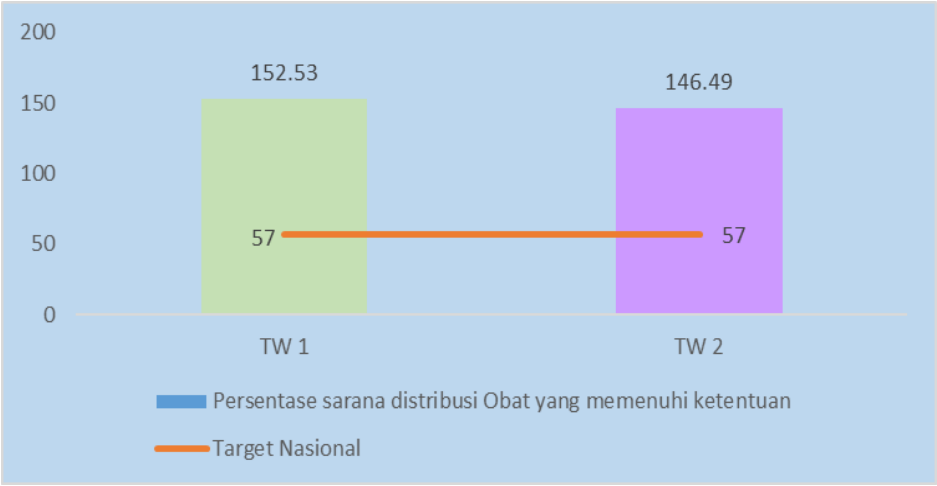

Gambar 17. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW I tahun 2021 dibandingkan TW 2II tahun 2021

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW 1 maupun TW 2 telah mencapai target yang ditetapkan, serta dapat diketahui bahwa persentase pada TW 2 **menurun** dibandingkan dengan TW 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(tetapi sama-sama berkriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”). Hal ini dipengaruhi oleh makin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi belum dapat sebagai kesimpulan akhir karena masih menunggu hasil triwulan berikutnya.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2020 s/d Triwulan 2 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	47	33	14
2.	Apotek	52	35	17
3.	Toko Obat	13	11	2
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	13	11	2
5.	Rumah Sakit (RS)	37	36	1
6.	Puskemas	115	114	1
7.	Klinik	17	10	7
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	110	85	25
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen	19	15	4
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	155	135	20
12.	Fasilitas Distribusi Pangan	222	183	39
TOTAL		**800**	**668**	**132**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sangsi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan sarana pelayanan kefarmasian yang mengadakan obat dari jalur tidak resmi diberikan sanksi PSK (Penghentian Sementara Kegiatan) walau pengadaannya hanya beberapa kali dan terutama pengadaan dari pasar Pramuka

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✔ Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan distribusi dan pengadaan obat antar apotek, misalnya jaringan apotek Kimia Farma, K-24, Century dan Boston.
- ✔ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti toko obat dan sarana distribusi retail terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhapa pencapaian *output*.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Pelatihan aspek aspek Cara Distribusi Obat yang Baik. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana illegal.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 2 tahun 2021, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Namun demikian, hasil ini sebenarnya belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja.

14. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 6. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	4.20	4.20	4.54	108.10	**BAIK**

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) *Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);*
2) *Profesionalitas SDM (18%);*
3) *Sarana Prasarana (15%);*
4) *Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);*
5) *Konsultasi dan Pengaduan (15%);*
6) *Inovasi (7%).*

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Berdasarkan hasil penilaian internal kinerja UPP BPOM yang telah dilaksanakan pada periode Mei-Juni 2021, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta diperoleh sebesar 4.54 (A/ Pelayanan Prima). IPP yang diperoleh BBPOM di Jakarta telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melampaui target tahun 2021, yaitu 4.20 dengan capaian 108.10%, sehingga diperoleh kinerja dengan kriteria sangat baik. Dengan hasil ini, BBPOM di Jakarta telah berhasil mencapai Pelayanan Prima dan menjadi 5 (lima) besar UPP BPOM terbaik tahun 2021 setelah BBPOM di Denpasar, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Biro Hukum dan Organisasi, dan BBPOM di Yogyakarta.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020*

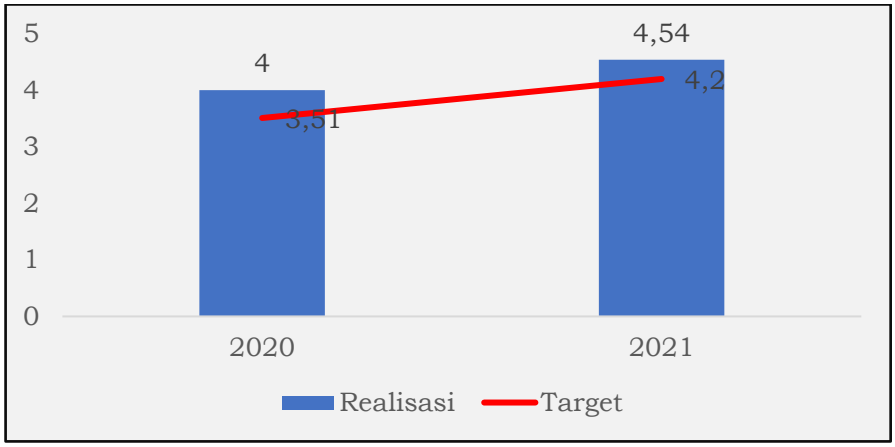

Gambar 3 Perbandingan realisasi dan capaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020 dan 2021

Indeks pelayanan publik (IPP) di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 sebesar 4.54 (Pelayanan Prima) meningkat secara signifikan dari tahun 2020 sebesar 4.00 (Baik). Realisasi IPP tahun 2021 ini telah melampaui target sebesar 4.20 dengan capaian sebesar 108.10% (kategori Baik). Begitu pula capaian tahun 2020 juga telah melampaui target sebesar 3.51 dengan capaian 113.96% (kategori Sangat Baik).

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan capaian Indeks Pelayanan Publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021 ini hingga memperoleh Pelayanan Prima dengan nilai 4.54 dapat disebabkan oleh beberapa upaya yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Pada aspek kebijakan layanan, SK standar pelayanan telah mencakup 14 komponen sesuai dengan Permenpan RB No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Layanan dan juga sudah menckaup seluruh layanan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

meliputi Layanan Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak Ketiga, Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Sertifikasi.

- Sudah tersedianya sistem antrian elektronik dibagi untuk setiap jenis layanan, nomor antrian sudah ditampilkan di layar, diarahkan ke loket yang dituju serta dipandu dengan pengeras suara.
- Penyusunan Standar Pelayanan sudah melibatkan *stakeholders* (lurah, akademisi, dan pelaku usaha) serta telah memanfaatkan hasil masukan survei kepuasan mayarakat (SKM) dalam proses penyusunannya.
- Standar pelayanan sudah dipublikasikan di area ruang pelayanan (berupa *leaflet*/brosur/poster/*banner*, buku saku/katalog), baliho di kelurahan, media cetak koran, *subsite* serta media sosial.
- Maklumat pelayanan telah dipublikasikan dalam bentuk poster, *banner*, buku saku/katalog, media cetak koran, *subsite*, media sosial dan di ruang terbuka publik.
- Pengisian SKM oleh seluruh pengguna layanan baik secara langsung dan/ atau *online* baik yang permohonannya disetuji maupun ditolak.
- Informasi hasil SKM telah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai tempat dan media informasi (media sosial, *subsite*, baliho/banner, leaflet, buku saku/katalog, media cetak koran).
- Telah dilakukan SKM secara mandiri, hasil SKM dan bentuk saran serta rekomendasi telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan.
- Telah dibuat SK tim layanan publik yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan dan profilnya dapat diakses di *subsite*.
- Adanya jam kerja layanan harian dari 08.00-16.00 tanpa jeda wkatu istirahat dengan sistem istirahat bergilir tanpa menghentikan pelayanan publik saat istirahat serta adanya layanan konsultasi *extra time* pada hari libur/malam hari melalui media sosial (Instagram dan Twitter).
- Pelaksana layanan sudah dilengkapi dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayananan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi).
- Sudah tersedia sarana prasarana khusus untuk kelompok rentan/penyandang difabel, berupa area parkir khusus, kursi roda, loket khusus, toilet khusus dan petugas layanan khusus).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Sudah lengkapnya fasilitas toilet yang mencakup toilet terpisah antara pria dan wanita serta ada pilihan kloset duduk maupun jongkok dilengkapi wastafel dan toiletres.
- Telah tersedianya ruang layanan khusus yang tertutup untuk pengaduan masyarakat yang terpisah dari loket pelayanan lainnya di bagian depan kantor sehingga mudah diakses.
- Informasi pengelolaan dan pengaduan, buku *Q&A* konsultasi dan *e-book* sertifikasi sudah tersedia di *subsite* dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.
- Telah tersedia informasi non elektronik yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat berupa *leaflet, banner* yang dipublikasikan di ruang publik dan didistribusikan ke *stakeholder* berupa perpustakaan daerah, kantor pemerintah lainnya, seperti kantor kelurahan, kantor walikota, kantor suku dinas kesehatan.
- Adanya inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun dan dapat direplikasi, yaitu Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru).

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan*

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 hingga mencapai Pelayanan Prima, antara lain:

- Penambahan jenis layanan berupa Layanan Sertifikasi ke dalam Standar Pelayanan BBPOM di Jakarta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Pelaksanaan monev pengaduan dan SKM mandiri yang dilakukan secara rutin tiap triwulan dan bulanan sebagai acuan dalam perbaikan standar pelayanan secara terus-menerus.
- Intensifikasi pemanfaatan subsite dan media sosial sebagai sarana publikasi dan layanan yang tidak terbatas waktu dan tempat.
- Peningkatan kualitas sarana prasarana berupa renovasi ruang layanan, pembangunan toilet yang memadai, pengadaan mesian antrian elektronik serta fasilitas kantin dan ATK untuk pengguna layanan.
- Peningkatan inovasi pelayanan publik agar dapat diterapkan secara optimal untuk memberikan kemudahan masayarakat dalam menerima

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

layanan publik di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta, seperti LAILA (layanan informasi dan pengaduan melalui aplikasi Whatsapp), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi Online), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), e-book sertifikasi, Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM Jakarta) dan layanan permohonan pengujian yang sudah dapat dilakukan secara *online* melalui *Whatsapp* maupun *e-mail*.

- Pelatihan Penerapan Budaya Prima kepada seluruh pegawai yang dilakukan dengan metode *hybrid* (kombinasi luring dan daring) dengan tema "*Customer Service Excellent Mindset and Implementation*" pada 9 April 2021.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Indeks pelayanan public tahun 2021 ini berhasil meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan telah tercatat sebagai keberhasilan BBPOM di Jakarta meraih pelayanan prima. Adapun evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerka periode tahun 2020, meliputi:

- Aspek Kebijakan Pelayanan

  Rekomendasi yang terkait meliputi monev terhadap Standar Pelayanan, pemanfaatan masukan hasil monev pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pemasanganan Standar Pelayanan Publik yang dapat dibaca dengan mudah di ruang pelayanan berupa leaflet/banner, media cetak dan *website*.

  Tindak lanjut dari rekomendasi ini sudah dilaksanakan seluruhnya, yaitu sudah dilakukannya monev Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan saran dari hasil SKM, standar dan maklumat pelayanan pun sudah dipublikasikan berupa leaflet/brosur/poster/banner, buku saku/katalog, baliho, media cetak koran, subsite, dan media sosial serta telah dipubikasikan di ruang pelayanan publik dan area terbuka.

- Aspek Profesionalisme SDM

  Rekomendasi yang terkait aspek ini meliputi implementasi penggunaan atribut berupa PIN/logo Unit Pelayanan serta profil pelaksana yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dipublikasi di ruang pelayanan dan data dukung penerapan kode etik pelayanan dan penerapan sanksi yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi sudah dilengkapinya pelaksana layanan dengan pakaian seragam khusus, identitas nama, PIN/atribut/logo unit pelayananan dan mempraktikkan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi), profil pelaksana layanan juga sudah dipublikasi di ruang pelayanan dan *subsite*.

- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

  Rekomendasi berupa *subsite* UPP BPOM dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga serta data sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik berupa sistem data informasi pelayanan yang mengacu *subsite*, aplikasi proses bisnis mengacu qms.pom.go.id, sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu Simolekdesi, dan SDM mengacu SIASN.

  Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi pemutakhiran data sistem informasi pelayanan publik di *subsite* yaitu informasi terkait standar pelayanan, maklumat pelayanan, profil pelaksana layanan, pengelolaan dan pengaduan, buku Q&A konsultasi dan e-book sertifikasi sudah tersedia di subsite dan dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan

  Rekomendasi berupa penambahan data dukung dokumen/arsip untuk tamu yang datang langsung serta rekapitulasi hasil pengaduan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

  Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa telah tersedianya buku katalog di ruang pelayanan yang berisi standar pelayanan, maklumat pelayanan, hasil SKM, data pengaduan sehingga mudah untuk diakses tamu yang datang langsung.

- Aspek Inovasi

  Rekomendasi berupa implementasi inovasi secara terus-menerus dan monev berkelanjutan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan selanjutnya dapat direplikasi serta diikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan/ atau penghargaan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tindak lanjut yang telah dilakukan ialah implementasi inovasi Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru) sebagai inovasi yang telah diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berkelanjutan dan sedang dalam proses untuk direplikasi oleh unit BPOM lainnya.

Selain itu, terdapat pula rekomendasi baru untuk peningkatan kinerja periode berikutnya, meliputi:

- Perlu dibuat laporan implementasi penilaian pemberian *reward* dan *punishment* tiap bulannya.
- Perlunya surat edaran mengenai seragam Senin sampai dengan Jumat bagi pegawai dan petugas pelayanan publik BBPOM di Jakarta.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI5 + NPI6}{6}$$

$$NPS = \frac{96.66\% + 134.39\% + 110.96\% + 133.29\% + 146.49 + 4.54}{6}$$

NPS = 121,65%

Dengan NPS 121,65%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jak

Sasaran Strategis-: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

15. <u>Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tabel 7. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90.99	90.99	94.27	103.60	**Baik**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
2) KIE langsung ke masyarakat; dan
3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survei.* Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Ekektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2021 diperoleh nilai 94.27 (Sangat Efektif) melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90.99 (103.60%) dengan kriteria Baik. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE triwulan II tahun 2021 merupakan akumulasi hasil pengukuran triwulan I hingga II tahun 2021. Nilai ini diperoleh dari 129 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan selama periode hingga triwulan II tahun 2021.

b. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2021*

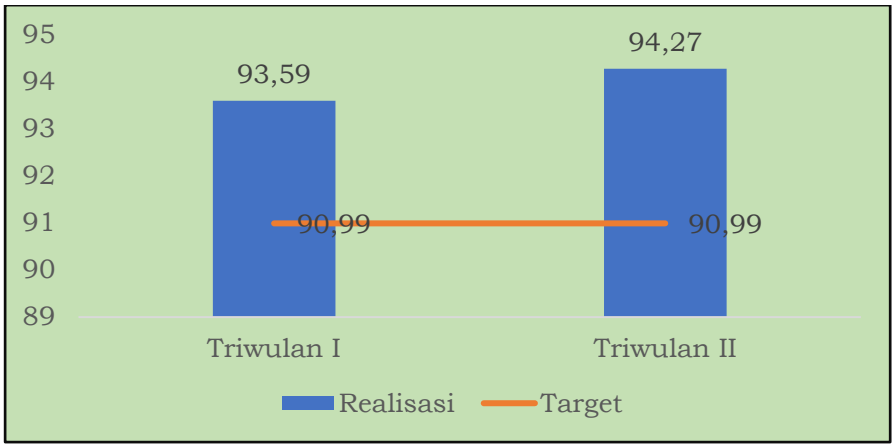

Gambar 4 Perbandingan realisasi kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I dan triwulan II tahun 2021

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2021 merupakan akumulasi hasil pengukuran triwulan I hingga II tahun 2021. Hasil tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta triwulan II ini diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap 129 responden sebesar 94.27 dengan capaian kinerja 103.60% (kriteria Baik). Hasil ini menunjukkan peningkatan realisasi dan capaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dibandingkan dengan triwulan I yang diperoleh dari 66 responden sebesar 93.59 dengan capaian kinerja 102.86% (kriteria Baik).

c. *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Peningkatan indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2021 bila dibandingkan dengan hasil pada Triwulan I tahun 2021 meliputi nilai masing-masing indikator, yaitu ragam kegiatan sebesar 91.26 menurun sebesar 0.01 poin, pemahaman sebesar 96.04 meningkat sebesar 0.06 poin, manfaat sebesar 95.54 meningkat sebesar 0.46 poin, dan minat sebesar 89.73 meningkat sebesar 2.61 poin.

Kontribusi capaian terbesar berasal dari indikator pemahaman serta peningkatan terbesar yaitu indikator minat, yang berarti menunjukkan tingkat pemahaman dan minat masyarakat terhadap konten informasi yang diterima tinggi. Peningkatan nilai indikator pada pencapaian triwulan ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Kegiatan KIE lebih intensif dilakukan dengan metode pelaksanaan KIE langsung yang memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah sehingga materi dapat mudah dipahami.
- Pelaksanaan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapan protokol kesehatan.
- Penyebaran produk informasi kepada masyarakat melalui pertemuan langsung, KIE keliling dalam rangka pengawasan pangan takjil, bimbingan teknis kepada Kader Program Desa Pangan Aman, PJAS, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas serta bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pangan IRTP.
- Pembuatan dan penayangan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
- Penyampaian materi edukasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19, misalnya mengenai protokol kesehatan, Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sehingga meningkatkan minat masyarakat akan informasi tentang Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sedangkan untuk indikator ragam kegiatan sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan triwulan I tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis KIE BPOM, ragam kegiatan KIE yang paling diminati dan bermanfaat adalah KIE secara langsung, media sosial, webinar/daring, dan pameran yang memungkinkan peserta KIE berinteraksi dua arah. Oleh karena itu, sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan ialah memperbanyak kegiatan KIE Obat dan Makanan dengan beragam tema konten, terutama melalui media sosial yang dinilai efektif, dapat meningkatkan interaksi dan dapat menyasar berbagai kalangan masyarakat.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan*

Pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2021 ini ditunjang oleh berbagai program yang telah berjalan, meliputi:

- Kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat, Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih, Mufidayati, M.Si dengan menyasar berbagai kalangan masyarakat, seperti Ibu PKK, Karang Taruna, kelompok ojek *online*, dan kader pembangunan manusia.
- Bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan Kelurahan, Sekolah, dan Pasar melalui rangkaian kegiatan program prioritas nasional Desa Pangan Aman, PJAS, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Kegiatan KIE Obat dan Makanan pada kegiatan intensifikasi pengawasan dalam rangka menjelang bulan Ramadhan dan idul fitri 1432 H.
- Bimbingan teknis keamanan pangan dan CPPOB IRT bagi pelaku usaha IRTP di wilayah kabupaten administrasi Kepulauan Seribu sebagai bentuk pengawalan program pendampingan UMK di daerah destinasi wisata meliputi Pulau Pramuka dan Pulau Tidung.
- Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda, meningkatkan koordinasi dan *engagement* dengan responden KIE sehingga metode KIE yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keterlibatan responden dalam survei. Variasi konten KIE juga dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat bagi responden. Selain itu juga diperlukan tindak lanjut berupa koordinasi dengan Kelompok Substansu Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengolah survei apabila ada kendala penggunaan aplikasi Evaluasi KIE.

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 8. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	40	45%	50%	111.11	**Sangat Baik**

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari-Juni (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli-September (TW 3)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Oktober-Desember (TW 4)
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan II tahun 2021 ialah sebesar 50% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS (20%) yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 26 Maret 2021, Sosialisasi Keamanan Pangan (5%) pada 1 April 2021 , Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (15%) pada 6 April 2021, serta Pemberian Paket

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Edukasi (10%) kepada 28 sekolah intervensi baru tahun 2021 yang selesai di bulan April 2021. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS sebesar 50% telah mencapai target Triwulan II 45% (111.11%) dengan kriteria Sangat Baik.

b. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2021*

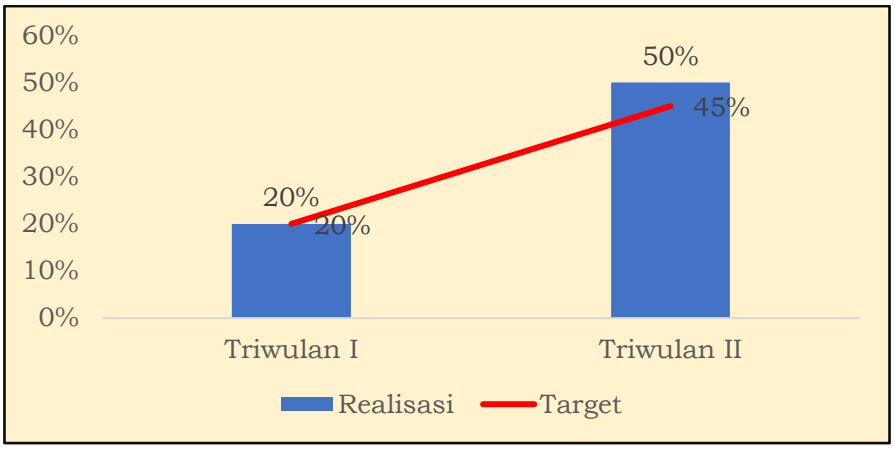

Gambar 5 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I dan triwulan II tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program PJAS di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan II tahun 2021 sebesar 50% telah melampaui target sebesar 45% dengan capaian sebesar 111.11% (kinerja Sangat Baik). Hasil ini meningkat dan lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan I yaitu sebesar 20% dengan capaian sebesar 100% (kinerja Baik).

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS pada Triwulan II ini yaitu adanya sinergisme dan dukungan lintas sektor terkait seperti Pemda, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui kegiatan Advokasi, dan adanya forum komunikasi dengan kader keamanan pangan dari sekolah-sekolah intervensi memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan kegiatan sosialisasi, bimtek keamanan pangan, dan pemberian paket edukasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan sekolah intervensi PJAS mengenai pembentukan Tim Kemanan Pangan Sekolah serta intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader dilakukan melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga informasi dan respon dapat diberikan dan diterima secara cepat. Selain itu, koordinasi melalui komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program intervensi PJAS.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Target intervensi PJAS pada tahun 2021 ini ialah 40 sekolah. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor dan sekolah target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

17. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 9. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	14	45%	45%	100	**Baik**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 14 kelurahan yang meliputi 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, *rapid test,* dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) - Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	15%	November-Desember (TW 4)
8	Pengawalan	10%	Juni-Desember

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
			(TW 2-TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2021 ialah sebesar 45% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa (20%) yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 26 Maret 2021, pengadaan paket informasi keamanan pangan, *rapid test*, dll. (5%) pada bulan Maret 2021, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (15%) di 9 (Sembilan) kelurahan intervensi pada 7-26 Juni 2021 serta Bimtek Komunitas, sekaligus pre intervensi untuk komunitas (5%) di 3 (tiga) kelurahan intervensi pada 21-30 Juni 2021. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan II yaitu 45% dengan capaian 100% (kriteria Baik).

b. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2021*

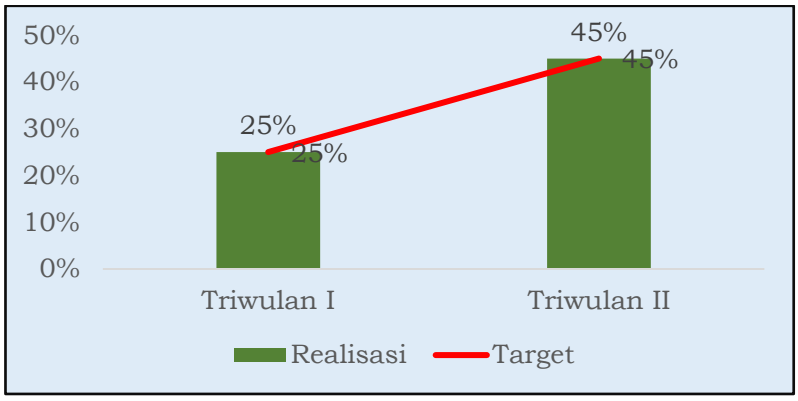

Gambar 6 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I dan triwulan II tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan II tahun 2021 sebesar 45% telah sesuai target dengan capaian 100% (kinerja Baik). Hasil ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan I yaitu sebesar 25% dengan capaian sebesar 100% (kinerja Baik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi *progress* tahapan program Desa Pangan Aman pada Triwulan II ialah 45%. Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan II ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini.

Selain itu, telah terbentuknya forum komunikasi dengan Tim dan Kader Keamanan Pangan dari kelurahan intervensi juga memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas Kelurahan sekaligus survei pre intervensi.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Target intervensi program Desa Pangan Aman pada tahun 2021 ini ialah 14 kelurahan yang terdiri atas 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor kelurahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Desa Pangan Aman tahun 2020 dapat dijabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sebagai berikut:

1) Faktor pendukung Program GKPD
   a) Komitmen Lurah beserta Tim Keamanan Pangan Desa untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b) Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa/kelurahan dan pengawasan keamanan pangan di desa/kelurahan.
c) Adanya dukungan OPD terkait terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di desa/kelurahan.
d) Tersusunnya dokumen rencana program keamanan pangan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
e) Adanya peningkatan komunitas usaha pangan desa/kelurahan dengan pemberian SPPIRT oleh Sudinkes.

2) Faktor penghambat Program GKPD
a) Koordinasi antara Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa perlu ditingkatkan.
b) Sistem pertemuan dan bimtek yang dilakukan secara *daring*, sehingga peserta yang mengikuti kurang fokus dan materi kurang dapat dipahami dengan baik.
c) Adanya kondisi Pandemi Covid 19 yang membatasi kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan yang membutuhkan interaksi tatap muka, sehingga pendampingan implementasi keamanan pangan oleh komunitas belum tercapai secara optimal.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2021, dapat dilakukan berbagai upaya optimalisasi faktor-faktor pendukung dan minimalisasi faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, salah satunya dengan cara intensifikasi koordinasi melalui forum komunikasi dengan kelurahan intervensi dan OPD terkait yang dapat dilakukan dengan *Whatsapp* dan diskusi pembahasan program baik secara tatap muka maupun daring melalui *Zoom.*

18. <u>Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 10. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2	60%	70%	116.67	**Sangat Baik**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis kominitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya,
2) Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah 2 (satu) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020. Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April (TW 2)
5	Penyuluhan	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	September-Oktober (TW 3-TW 4)
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan II tahun 2021 ialah sebesar 70% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi (20%) yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Desa Pangan Aman pada 26 Maret 2021, Survei Pasar (5%) pada 24 Maret 2021 ke pasar intervensi yaitu Pasar Gembrong Baru, Bimtek Pengelola Pasar (15%) pada 7 April 2021, Monev Tahap 1 Pasar (20%) pada April-Juni 2021, Penyuluhan (5%) pada 17 Juni 2021 serta Kampanye (5%) di Pasar Gembrong Baru. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II sebesar 70% telah melampaui target yaitu 65% dengan capaian 116.67% (kriteria Sangat Baik).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. *Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan Triwulan II Tahun 2021*

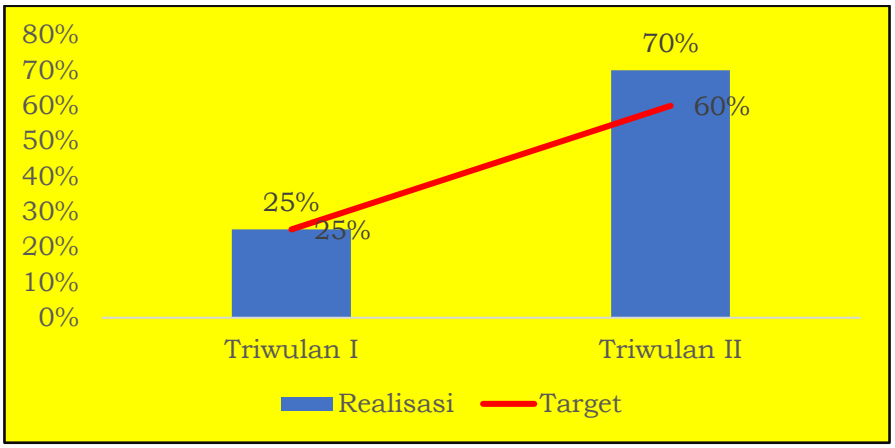

Gambar 7 Perbandingan realisasi kinerja *progress* tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I dan triwulan II tahun 2021

Realisasi kinerja *progress* tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta hingga Triwulan II tahun 2021 sebesar 70% telah melampaui target sebesar 60% dengan capaian sebesar 116.67% (kinerja Sangat Baik). Hasil ini meningkat dan lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi di Triwulan I yaitu sebesar 25% dengan capaian sebesar 100% (kinerja Baik).

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Pelaksanaan tahapan kegiatan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini sudah sesuai *timeline* yang ditetapkan. Kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana. Selain itu, dengan adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Telah terbentuknya forum komunikasi dengan pengelola pasar juga mejadi penyebab keberhasilan pencapaian target pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar, Monev Tahap I, Penyuluhan dan Kampanye Pasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2021 ini adalah 2 pasar meliputi 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

Dari pencapaian 4 target indikator pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS} = \frac{103.60 + 111.11 + 100.00 + 116.67}{4}$$

$$NPS = 107.84\%$$

Dengan NPS 107.84%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

19. <u>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</u>

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

Tabel 26. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN II TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.50	36	32.43	90.08	**Baik**

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*. Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga standar *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/*SOP*

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Walaupun capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan, namun masih dalam kriteria **"Baik"**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020-2019

c. Perbandingan realisasi dan capaian TW I dan TW II tahun 2021

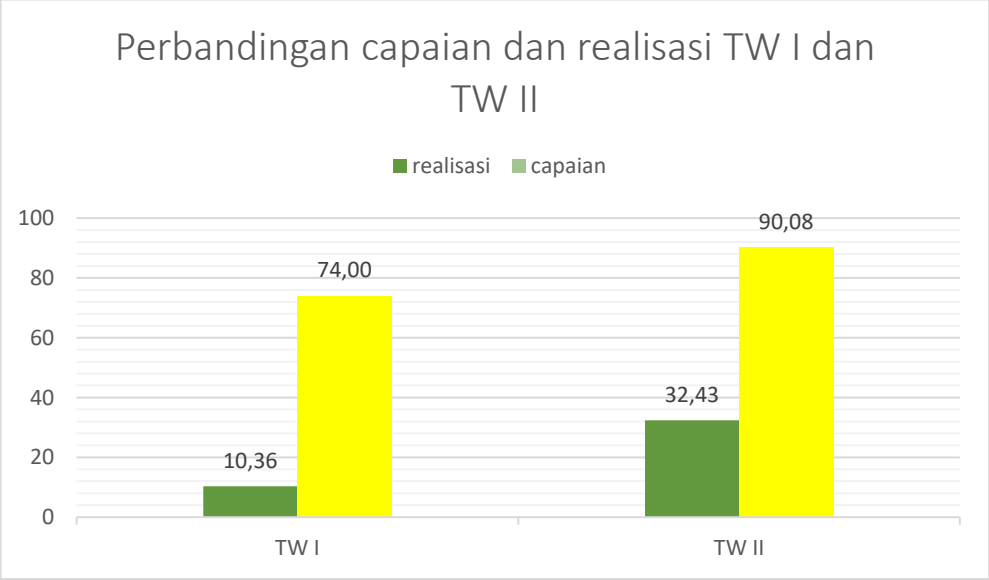

Gambar xx: Perbandingan realisasi dan capaian obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I dan TW II

Pada Triwulan II Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mengalami peningkatan yang cukup baik disbanding TW I karena sampel sudah cukup banyak yang selesai diuji di Laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pencapaian kinerja*

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi seriap tahunnya adalah 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten. Juga dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja, sebagaimana telah disebutkan dalam butir d di atas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2021*

- **Tabel 11. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89.5	36	41.05%	114.03	**Sangat Baik**

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar= $\frac{A+B}{2}$

A = $\frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan satu tahun}}$ x 100%

B = $\frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium}}$ x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jakarta pada Triwulan II tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 114,03 % dengan kriteria **"**Sangat baik**"**. Dengan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengujian di laboratorium Pangan Balai Besar POM di Jakarta telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM yaitu memenuhi parameter kritis sesuai Pedoman Sampling dan memenuhi *timeline* pengujian .

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW I dan TW II Tahun 2021

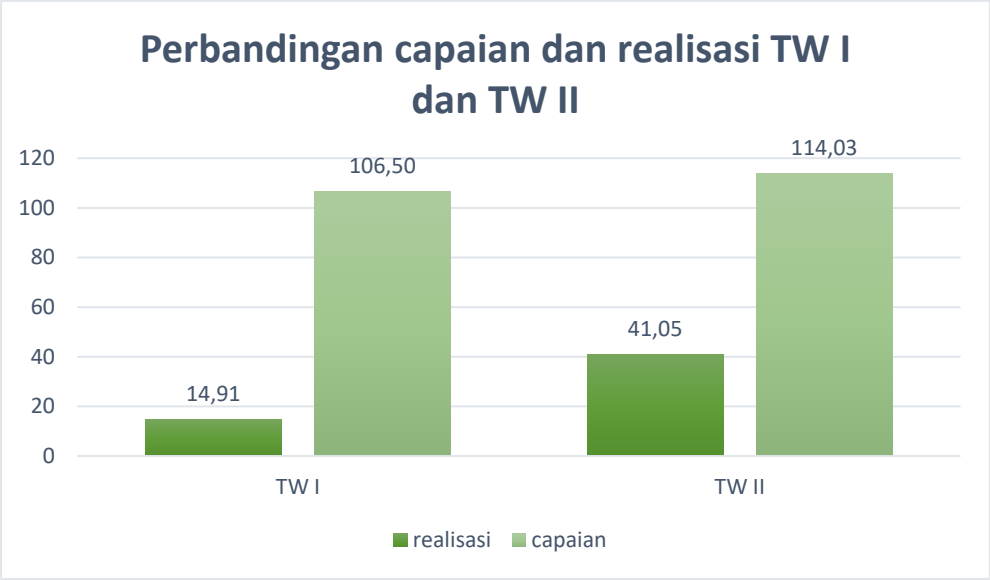

Gambar xxx. Perbandingan capaian dan realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I dan TW II

Pada Triwulan II Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar meningkat dibanding TW I, sudah melebihi target yang ditetapkan.

a. *Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan I adalah 10.77%, masih kurang dari target yang ditetapkan (14 %) dikarenakan sampel di TW I baru sampai pada tahap pengujian akhir maret dan sebagian baru dapat di laporkan di bulan April 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,untuk metode analisis pangan sebanyak 12 metode analisis per tahun.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan, yaitu dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{90.08\% + 114.03\%}{2}$$

NPS =102,06%

Dengan NPS 102,06%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

21. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TW2 2021	REALISASI	% CAPAIAN TW1I 2021	KRITERIA
Tingkat keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan	40	20	24,91	124,55%	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan denga melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

{(15%xA) + (40%xB) + (30%xC) + (15%xD)} x (jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan kedua atau April - Juni 2021 adalah **melebihi target** yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan **24,91** dari target tingkat keberhasilan di triwulan kedua 2021 sebesar **20,00** dengan kriteria "**tidak dapat disimpulkan**". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan kedua atau periode April - Juni 2021, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidanan obat dan makanan, meskipun tingkat keberhasilannya tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja
   Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja. *Spreadsheet* ini dijalankan sejak penerapan kerja WFH WFO hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS)
   Penyidik PNS tidak lepas dari koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan kedua ini merupakan hasil dari koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perkara. Sebagai hasil dari koordinasi yang semakin optimal maka beberapa perkara tunggakan menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian perkara termasuk tahap SP3, yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2021.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait
   Perubahan besar yang terjadi dengan diberlakukannya UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan perubahan paradigma penindakan. Selain itu, masih masifnya peredaran obat dan makanan secara daring/elektronik juga terus menimbulkan tantangan baru bagi kinerja penindakan. Keterbatasan kewenangan dan kemampuan petugas BBPOM di Jakarta diatasi dengan menjalin kerja sama dengan lintas sektor terkait yakni Deputi Kelompok Substansi Penindakan BPOM, Polda Metro Jaya, kurir pengiriman dan pengelola *marketplace*. Pada triwulan kedua, kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi peredaran obat dan makanan ilegal melalui situs daring/elektronik yang melibatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait dapat menghasilkan temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Namun dengan perubahan peraturan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap target dan indikator kinerja penindakan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sepanjang triwulan kedua ini, kombinasi dari kegiatan intelijen dan patroli siber masih menjadi kegiatan penunjang keberhasilan penentuan target operasi penindakan. Dari tiga kegiatan penindakan yang dilakukan sepanjang triwulan kedua, dua diantaranya merupakan kegiatan penindakan hasil dari pendalaman informasi dari kegiatan intelijen dan patroli siber tersebut. Kerja sama dengan pengelola marketplace juga terus dibina sehingga upaya penelusuran dan pendalaman informasi mendapatkan hasil yang valid dan optimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS dan bagian pengawasan penyidikan (wasidik) Polda Metro Jaya merupakan kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tak kalah penting, pencapaian yang jauh di atas target ini juga sebagai hasil dari peningkatan koordinasi dengan Direktorat Penyidikan dan Direktorat lain di Kedeputian 4 serta CJS dalam upaya percepatan penanganan perkara.

d. Analisis terhadap penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dari indeks efisiensi dikurangi dengan standar efisiensi (1). Sedangkan indeks efisiensi merupakan hasil pembagian dari output terhadap input.

Pada periode triwulan kedua tahun 2021 hasil penilaian tingkat efisiensi anggaran di Kelompok Substansi Penindakan adalah sebesar **0,026** atau capaian masuk ke dalam kategori efisien (100%). Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2021.

Pada triwulan kedua, penggunaan anggaran untuk output perkara di bidang obat dan makanan sebesar Rp 335.866.337 dari total anggaran Rp 1.156.920.000 (29,03%) sementara dari output laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan telah digunakan sebesar Rp 346.211.958 dari total anggaran Rp 601.702.000 (57,54%). Realisasi penggunaan anggaran Kelompok Substansi Penindakan sebanyak Rp 682.078.295 atau sebesar 38,78% dari total anggaran Rp 1.758.622.000. Penggunaan sumber daya pada triwulan berikutnya tetap akan ditingkatkan efisiensinya sesuai dengan perencanaan yang telah disusun untuk mendukung pencapaian target kinerja.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pencapaian triwulan kedua ini merupakan hasil dari optimalisasi penanganan perkara yang dilakukan, baik secara internal BPOM dengan Direktorat Penyidikan dan Direktorat lain di Kedeputian 4, maupun secara eksternal dengan CJS terkait. Terdapat hasil yang tidak dapat disimpullkan (> 120%) mengingat perhitungan indikator kinerja meliputi hasil perhitungan penyelesaian perkara tahun berjalan dan perkara tunggakan/*carry* over dimana penyelesaiannya tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh PPNS BBPOM di Jakarta. Faktor yang mempengaruhi antara lain: petunjuk jaksa, keberadaan saksi/tersangka, pemeriksaan ahli dari pihak eksternal, dan lan-lain. Perhitungan indikator kinerja termasuk juga tahap SP3, dimana apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Hasil dari koordinasi yang semakin optimal tersebut,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berdampak pada penyelesaian perkara tunggakan yang mengarah pada penyelesaian perkara. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi indikator kinerja tahun 2021.

Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan intelijen hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai target kinerja yang belum terlaksana di triwulan kedua akan disiapkan untuk dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen *Plan of Action* 2021.

Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

22. <u>Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	90	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Nilai indeks dihitung dari Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama pada akhir tahun. Namun demikian, dalam rangka mengawal Program Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Setiap Pokja Reformasi Birokrasi secara aktif dan konsisten melaksanakan rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun termasuk melakukan inovasi diberbagai bidang dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja serta pelayanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II antara lain:

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM baik kepada internal maupun eksternal (stakeholder) melalui berbagai media informasi
2. Evaluasi dokumen sistem manajemen mutu
3. Penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional (SIPT, SPIMKER, SIASN, SIMAK, SIRUP, e-planning, e-performance, dll)
4. Penerapan Program *Fraud Control Plan*
5. Program-program Inovasi seperti Kerling (sertifikasi keliling), ARIPIN, SABBENI, Si Piket, dll

23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 32. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN ITAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN ITAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85	-	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
   b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%)
   b. Kualitas pengukuran (12,5%)
   c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%)
   b. Kualitas pelaporan (7,5%)
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%)
   b. Kualitas evaluasi (5%)
   c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
   a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
   b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
   c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

(2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90

(3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

(4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

(5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60

(6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

(7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Capaian Nilai AKIP BBPOM di Jakarta pada Triwulan Itahun 2021 belum tersedia karena hasil penilaian oleh APIP baru akan diterima pada akhir tahun 2021. Penilaian AKIP BBPOM di Jakarta dilakukan pada akhir tahun 2021. BBPOM Jakarta selama periode Triwulan II Tahun 2021 tetap konsisten melaksanakan kegiatan untuk menunjang nilai akuntabilitas, antara lain:

1. Evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan dan akhir triwulan serta menetapkan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pencapaian target kinerja
2. Melaksanakan sosialisasi SAKIP dan monev online
3. Penggunaan Aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance)
4. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi baik internal Badan POM maupun kepada eksternal (Bappenas, Kementerian Keuangan)
5. Melakukan Perbaikan terhadap hasil Desk SAKIP 2020 dan mengimplementasikannya pada SAKIP 2021

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

24. <u>Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN ITAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN ITAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

(1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
(2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
(3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
(4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesionalitas dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Akhir Tahun 2021. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta pada Triwulan II Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan indeks professionalitas ASN, yaitu:

1. Tugas Belajar bagi 5 orang pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pegawai
2. Menyelenggarakan bimtek sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh pegawai dan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang diselenggarakan oleh Pusat maupun instansi lain sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

3. Memantau peningkatan kinerja pegawai melalyi evaluasi pencapaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap triwulan kepada seluruh pegawai BBPOM di Jakarta
4. Pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, antara lain terkait absensi

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

25. <u>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</u>

Sampai dengan Triwulan II belum dilakukan Assasment GLP oleh P3OMN sehingga realisasinya belum ada.

26. <u>Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal</u>

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 35. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN ITAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	1,7	85	**CUKUP**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di *BOC (BPOM Command Centre)*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- *BCC* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  (1) Terdapat data dan informasi dalam sistem *BCC* yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan oleh UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email, sharing folder, dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan II Tahun 2021 adalah 1,7 atau 85 % dari target triwulan II dengan kriteria CUKUP. Target tidak tercapai karena terdapat indikator yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mencapai target, yaitu pada nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC yang hanya memperoleh nilai 1,4 pada Triwulan II

Pada Triwulan 1, Indeks Pengelolaan Data dan Informasi memperoleh nilai 2,1 dari target 2 (capaian 105%/ kriteria BAIK). Sedangkan pada Triwulan II ini terjadi penurunan capaian menjadi 85% (kriteria CUKUP).

Bila dibandingkan dengan target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2021 sebesar 2, maka nilai capaian indeks pada Triwulan II ini masih perlu ditingkatkan di Triwulan berikutnya untuk mencapai indeks 2 karena nilai akhir tahun merupakan akumulasi dari nilai indeks pada Triwulan I – IV.

b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Penurunan nilai indeks pengelolaan data dan informasi ini merupakan kontribusi dari nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC yang cukup rendah (1,4), sedangkan nilai Indeks Pemanfaatan data dan informasi tidak cukup menyumbang nilai karena hanya berada pada limit batas sesuai target, yaitu 2. Untuk itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC
   Nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC terdiri dari SIPT (80%) dan Spimker (20%). Nilai Spimker sudah cukup tinggi (3) namun hanya memberikan bobot 20%, sedangkan nilai SIPT hanya 1,6 sedangkan memberikan bobot 80%. Rendahnya nilai SIPT karena persentase sampling hanya 43,87%. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target dan capaian sampling pada BOC SIPT
2. Meningkatkan nilai Indeks Pemanfaatan data dan informasi diatas ambang batas untuk mengimbangi nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC yang cukup rendah
   Masih terdapat nilai yang rendah pada indeks pemanfaatan sistem informasi BOC, yaitu 0, karena nilai rata-rata akses BOC kurang dari 55% meskipun pada bulan April-Juni akses berkisar 70-95%. Hal ini disebabkan oleh nilai akses BOC pada bulan Januari dan Februari yang cukup rendah (0 dan 10%) sehingga berdampak terhadap akumulasi di triwulan II. Akses BOC pada Triwulan selanjutnya perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan nilai indeks pemanfaatan data dan informasi sehingga akan berpengaruh pada kenaikan nilai indeks pengelolaan data dan informasi. Perlu dibuat jadwal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

akses BOC oleh penanggungjawab akses untuk memastikan bahwa akses BOC dilaksanakan secara maksimal dan didokumentasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*
   - Program pemanfaatan email corporate secara berkala oleh setiap pegawai telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara maksimal (3)
   - Pemanfaatan sharing folder sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks maksimal (3). Sharing folder dilakukan dengan akses pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk
   - Pemantauan indeks pengelolaan data dan informasi dilakukan oleh Tim IT yang tercantum dalam SK Tim IT. Sudah ada pembagian yang jelas mengenai tugas dan pelaporan berkala yang harus dilakukan, namun belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terhadap capaian masing-masing indikator yang membangun indeks pengelolaan data dan informasi. Dengan adanya evaluasi yang lebih dini (bulanan), diharapkan nilai indeks dapat ditingkatkan pada bulan-bulan selanjutnya sebelum periode triwulan berakhir
   - Pemahaman Tim IT terhadap penilaian indeks pengelolaan data dan informasi perlu ditingkatkan sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

27. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2021

Tabel 36. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94	37	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

(1) Revisi DIPA
(2) Deviasi Halaman III DIPA
(3) Pengelolaan UP
(4) Rekon LPJ Bendahara
(5) Data Kontrak
(6) Penyelesaian Tagihan
(7) Penyerapan Anggaran
(8) Retur SP2D
(9) Perencanaan Kas (Renkas)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus : (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Pada Triwulan 1 Tahun 2021, nilai IKPA BBPOM di Jakarta 93,77. Sesuai dengan PER-4/PB/2021, untuk Periode Triwulan I Tahun 2021, tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output. Sedangkan nilai EKA belum diperoleh sehingga Nilai Kinerja Anggaran belum dapat ditentukan dan dianalisis

Pada Triwulan II, Nilai Kinerja Anggaran belum dapat dihitung karena hanya tersedia nilai IKPA (91,95) sedangkan nilai EKA dari web SMART DJA belum tersedia. Bila dibandingkan dengan target NKA Triwulan II yaitu 37, maka nilai NKA (hanya dengan komponen nilai IKPA tanpa EKA) adalah 36,78. Nilai ini sudah cukup baik mengingat nilai EKA belum diperhitungkan. Dari 13 indikator pembentuk IKPA, hanya 1 indikator dengan nilai rendah yaitu Deviasi Halaman III DIPA (1,7) dan 1 indikator tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan, yaitu renkas untuk transaksi > 1 M.

Nilai IKPA Triwulan II dibandingkan dengan Triwulan I terjadi penurunan, yaitu 93,77 menjadi 91,95 sehingga nilai NKA juga menurun dari 37,51 menjadi 36,78. Nilai IKPA pada awal tahun 2021 cukup baik karena dilakukan penilaian terhadap deviasi halaman III DIPA dan capaian output.

Nilai NKA Periode Triwulan (36,78) masih jauh dari target tahunan (95%, efisien) karena nilai EKA yang memiliki bobot yang lebih besar belum diperhitungkan. Nampak pada nilai IKPA, kegiatan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan sudah cukup baik dan perlu dipertahankan sampai akhir tahun 2021.

b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Nilai IKPA sudah cukup baik. Tiga dari 4 aspek IKPA telah memperoleh nilai tinggi, yaitu aspek kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan pelaporan telah dilakukan tepat waktu yaitu laporan bendahara, laporan capaian output, laporan data kontrak. Sedangkan aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan masih perlu dilakukan perbaikan karena penyimpangan yang cukup besar antara rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dengan aktual penyerapan anggaran. Kondisi pandemi Covid yang tidak menentu menuntut pengelola kegiatan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh terhadap perubahan Perencanaan Kegiatan yang telah disusun di awal tahun

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di akhir tahun 2021.

28. <u>Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta</u>

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 36. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Bear POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Tidak Efisien (75%)	78,95%	**Cukup**

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

capaian *input*. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*, dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1; Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien, dengan kriteria:

(1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1

(2) Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

Capaian ITE dihitung dengan jangkauan sebagai berikut:

(1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)

(2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)

(3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)

(4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)

(5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

(6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)

(7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)

(8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)

(9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)

(10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

(11) < 0 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat Efisiensi anggaran Triwulan II sama dengan Triwulan I tahun 2021. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 75%, belum mencapai target yang ditetapkan baik terhadap target triwulan I maupun target tahunan (95%, efisien). Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 78,95% dari target.

b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Tingkat efisiensi anggaran tidak mencapai target karena pelaksanaan kegiatan masih terus berjalan sampai akhir tahun sesuai dengan perencanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid sehingga beberapa kegiatan dilakukan modifikasi baik perubahan dari onsite menjadi daring maupun *hybrid* sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi kegiatan

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Selama masa pandemi COVID-19, Balai Besar POM di Jakarta berupaya tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adaptasi pola pelaksanaan sebagian besar kegiatan menjadi daring. Antisipasi perubahan kondisi selama masa pandemi COVID-19 yang bertumpu pada kegiatan daring berdampak positif pada pencapaian *output.* Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi tetap efisien

3.1. Realisasi Anggaran

Pada periode Triwulan II Tahun 2021, terdapat penghematan anggaran sebesar 1,3 M yang berasal dari anggaran belanja mengikat (TUKIN) sesuai dengan instruksi dari Kementerian Keuangan sehingga Pagu DIPA BBPOM di Jakarta berkurang dari Rp. 47.430.798.000,00 menjadi Rp. 46.199.752.000. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 17.159.688.477 (37,4%)

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Terdapat perubahan pagu angggaran pada 5 sasaran strategis karena adanya revisi DIPA yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal
3. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal
4. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
5. Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian *input*
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.458.734.200	Rp. 264.071.828	18,10%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 189.354.990	Rp. 57.206.855	30,21%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 3.137.445.290	Rp. 122.265.773	3,89%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.489.531.220	Rp. 305.904.661	20,53%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi	Rp. 3.530.366.000	Rp. 1.922.159.700	54,45%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian *input*
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta			
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 615.171.800	Rp. 113.173.641	18,10%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Rp. 1.758.622.000	Rp. 682.078.295	38,78%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Rp. 950.840.500	Rp. 305.279.799	32,11%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Rp. 23.342.370.000	Rp. 12.225.531.167	52,37%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp. 8.766.475.500	Rp. 856.756.961	9,77%
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Rp. 950.840.500	Rp. 305.279.799	32,11%

- Rendahnya capaian anggaran pada sasaran 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” karena pengujian sampel menggunakan sisa reagen tahun yang lalu. Pengadaan reagen tahun 2021 masih dalam proses.
- Rendahnya capaian anggaran pada sasaran 3 “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” disebabkan semakin optimalnya penggunaan teknologi informasi sehingga penyebaran informasi melalui media sosial semakin masif meskipun tanpa penggunaan anggaran yang signifikan
- Rendahnya capaian anggaran pada sasaran 6 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid 19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

sehingga terdapat kebijakan WFH dalam rangka memutus rantai penyebaran virus sehingga sebagian besar kegiatan pemeriksaan dilaksanakan secara daring

- Rendahnya capaian anggaran pada sasaran 10 "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan" karena sebagian anggaran akan dialokasikan untuk pembangunan Lab BSL 2 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid 19, dan sampai saat ini masih dalam proses konsultasi konstruksi dan denah.

3.2. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 Triwulan II sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 38. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan I tahun 2021

Kode	Program/*Output*/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	*output*				
3165.ADD.001	***Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice***	30,43	50	1,64	1	0,64	Efisien
3165.AEA.001	***Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM***	57,54	41,67	0,72	1	-0,28	Tidak Efisien
3165.BAH.001	***Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM***	25,12	100	3,98	1	2,98	Tidak Efisien
3165.BDC.001	***KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM***	88,88	97,8550	1,1	1	0,1	Efisien
3165.BKB.001	***Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan***	32.11	50	1,56	1	0,56	Efisien
3165.BMB.001	***Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM***	1,91	46,15	24,16	1	23,16	Tidak Efisien
3165.CAB.001	***Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice***	0	50	-	1	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kode	Program/*Output*/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	*output*				
3165.CAB.002	***Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia***	16,08	50	3,11	1	2,11	Tidak Efisien
3165.CAB.003	***Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia***	0	50	-	1	-	
3165.QCD.U01	***PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI/ BALAI BESAR POM***	29,03	33,33	1,15	1	0,15	Efisien
3165.QDB.001	***Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman***	35,69	50	1,40	1	0,40	Efisien
3165.QDB.002	***Desa Pangan Aman***	18,04	45	2,50	1	1,50	Tidak Efisien
3165.QDB.003	***Pasar aman dari bahan berbahaya***	41,24	70	1,70	1	0,70	Efisien
3165.QIA.001	***Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM***	17,03	52,01	3,05	1	2,05	Tidak Efisien
3165.QIA.005	***Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM***	19,07	35,28	1,85	1	0,85	Efisien
3165.QIA.008	***Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM***	10,14	86,67	8,55	1	7,55	Tidak Efisien
3165.QIC.001	***Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM***	12,48	48,35	3,88	1	2,88	Tidak Efisien
3165.QIC.004	***Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM***	20,51	68,85	3,36	1	2,36	Tidak Efisien
6348.EAA.004	***Layanan Perkantoran UPT***	52,95	41,67	0,79	1	-0,21	Tidak Efisien

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 19 (Sembilan belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,28 sampai 23,16. Dalam hal ini, semakin rendah TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Adanya Pandemi Covid 19 turut berpengaruh terhadap tingkat efisiensi, contoh, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara daring, akan menyerap input (anggaran) lebih kecil namun menghasilkan output yang sama sehingga tingkat efisiensi menjadi lebih besar. Hal ini terjadi antara lain terhadap layanan publikasi, sarana produksi dan sarana distribusi.

Beberapa kegiatan dilakukan perhitungan output melalui pembobotan tahap sehingga perlu dikaji kembali kesesuaian antara pembobotan tahapan dengan pembobotan anggaran sehingga tidak muncul gap yang terlalu besar yang dapat menyebabkan suatu kegiatan dianggap tidak efisien. Kegiatan tersebut antara lain Desa Pangan Aman.

Penggunaan sumber daya yang telah tersedia sejak awal tahun yang merupakan sisa dari persediaan tahun sebelumnya perlu dipertimbangkan sebagai salah saktu faktor yang dapat meningkatkan gap antara output dan input dan berpotensi meningkatkan tingkat efisiensi menjadi tidak efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 39. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	*output*				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	18,10%	97,51	5,39	1	4,39	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	30,21%	N/A	N/A	1	N/A	N/A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	*output*				
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	3,89%	N/A	N/A	1	N/A	N/A
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	20,53%	121,65	5,93	1	4,93	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	54,45%	107,66	1,98	1	0,98	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	18,10%	102,06	5,64	1	4,64	Tidak Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	38,78%	124,55	3,21	1	2,21	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	32,11%	N/A	N/A	1	N/A	N/A
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	52,37%	N/A	N/A	1	N/A	N/A
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9,77%	N/A	N/A	1	N/A	N/A
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	32,11%	N/A	N/A	1	N/A	N/A

Beberapa sasaran strategis tidak dapat dihitung nilai tingkat efisiensinya karena terkait data capaian indeks yang ditetapkan oleh Badan POM Pusat. Sebagian besar kegiatan disimpulkan tidak efisien. Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras. Hanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan kriteria EFISIEN karena Sebagian besar program pada struktur anggaran sudah selaras dengan indikator kinerja dan sasaran strategis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2021-2024. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 28 indikator kinerja utama.

1. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori "**baik**" (90% ≤ x <110%); 3 (tiga) indikator mencapai kategori "**cukup**" (70% ≤ x < 90%); 5 (lima) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori "**tidak dapat disimpulkan**", 4 (empat) indikator mencapai target dengan kategori "**sangat baik**" (110% ≤ x <120%).
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:
   Nilai pencapaian tertinggi pertama adalah pada sasaran strategis ke-tujuh sebesar 124,55% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.
   Nilai pencapaian kedua adalah pada sasaran strategis ke-empat sebesar 121,65% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, menunjukkan Balai Besar POM di Jakarta telah sangat berhasil dalam melayani masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

3. Dari 19 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 13 kegiatan yang tidak efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,28 hingga 3,86 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BBPOM di Jakarta)

4.2. Saran

1. Hingga Triwulan II tahun 2021, kegiatan banyak terkendala disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan pilihan utama selama masa pandemi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Rencana yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun 2021.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							
	Stakeholder						
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
	Learning and Growth						
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan UPT Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium Triwulan I tahun 2021

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK: TIE/ llegal/ Palsu	TMK: kedaluarsa	TMK: rusak	TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji: MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	Hasil uji: TMS: MK Penandaan dan TMS uji	Hasil uji: TMS: TMK Penandaan dan MS Uji	Hasil uji: TMS: TMK Penandaan dan TMS uji	Hasil uji: TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
											kunci	kunci						kunci	kunci	kunci
						Januari														
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	640		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	0	0	0	3	6
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	20	0	0	0	0	20	15	15	0	0	0	0	0	5	15
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	480		29	0	0	0	0	29	21	21	0	0	0	0	0	8	21
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	160		19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	959		20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Obat Tradisional			144		9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	0	0	0	3	6
	Total Suplemen Kesehatan			48		9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	Total Kosmetik			288		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Jakarta			608	Targeted	28	0	0	0	0	28	6	6	0	0	0	0	0	22	6
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		28	0	0	0	0	28	6	6	0	0	0	0	0	22	6
	Total Obat			512	Random	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	Total Obat Tradisional			336		20	0	0	0	0	20	15	15	0	0	0	0	0	5	15
	Total Suplemen Kesehatan			112		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Total Kosmetik			671		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Jakarta			1631	Random	60	0	0	0	0	60	15	15	0	0	0	0	0	45	15
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		60	0	0	0	0	60	15	15	0	0	0	0	0	45	15
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		88	0	0	0	0	88	21	21	0	0	0	0	0	67	21
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	41	2	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	2	39	2
	0	0	-			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	-			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	Jakarta	759	Random	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0
	0	0	-			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	-			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Pangan			160	Targeted	41	2	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	2	39	2
	Total Pangan			759	Random	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0
	TOTAL PANGAN			919		82	2	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2	80	2
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK: TIE/ Ilegal/ Palsu	TMK: kedaluarsa	TMK: rusak	TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji: MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	Hasil uji: TMS: MK Penandaan dan TMS uji lab **	Hasil uji: TMS: TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	Hasil uji: TMS: TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	Hasil uji: TMS: TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
											kunci	kunci						kunci	kunci	kunci
						Februari														
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	36	0	0	0	0	56	29	25	0	4	0	0	4	27	29
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	640		40	0	0	0	1	60	29	25	0	4	0	0	4	31	29
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	22	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	38	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	2	41	2
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	480		60	2	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	2	66	2
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	160		25	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	0	40	10	10	0	0	0	0	0	30	10
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	72	0	0	0	0	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	959		102	0	0	0	0	122	19	16	0	3	0	0	3	103	19
	Total Obat			128	Targeted	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
	Total Obat Tradisional			144		22	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0
	Total Suplemen Kesehatan			48		5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0
	Total Kosmetik			288		30	0	0	0	0	40	10	10	0	0	0	0	0	30	10
	Jakarta			608	Targeted	61	0	0	0	1	83	10	10	0	0	0	0	0	73	10
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		61	0	0	0	1	83	10	10	0	0	0	0	0	73	10
	Total Obat			512	Random	36	0	0	0	0	56	29	25	0	4	0	0	4	27	29
	Total Obat Tradisional			336		38	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	2	41	2
	Total Suplemen Kesehatan			112		20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	Total Kosmetik			671		72	0	0	0	0	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9
	Jakarta			1631	Random	166	2	0	0	0	209	38	31	0	7	0	0	9	171	40
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		166	2	0	0	0	209	38	31	0	7	0	0	9	171	40
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		227	2	0	0	1	292	48	41	0	7	0	0	9	244	50
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	12	0	0	0	0	51	40	32	6	2	0	0	8	11	40
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	Jakarta	759	Random	89	0	0	0	3	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	Total Pangan			160	Targeted	12	0	0	0	0	51	40	32	6	2	0	0	8	11	40
	Total Pangan			759	Random	89	0	0	0	3	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0
	TOTAL PANGAN			919		101	0	0	0	3	181	40	32	6	2	0	0	8	141	40
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0	0	Random	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Maret														
											kunci	kunci						kunci	kunci	kunci
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMS					
															TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	1	3	1
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	60	0	0	0	4	87	39	35	0	4	0	0	4	48	39
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	640		60	0	0	0	4	91	40	35	0	5	0	0	5	51	40
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	23	0	0	0	10	48	6	6	0	0	0	0	0	42	6
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	39	0	0	0	16	80	15	15	0	0	0	0	0	65	15
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	480		62	0	0	0	26	128	21	21	0	0	0	0	0	107	21
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	6	0	0	0	2	20	9	7	0	2	0	0	2	11	9
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	19	0	0	0	8	49	13	13	0	0	0	0	0	36	13
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	160		25	0	0	0	10	69	22	20	0	2	0	0	2	47	22
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	0	4	36	24
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	0	20	87	54
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	959		98	0	0	0	66	201	78	54	2	22	0	0	24	123	78
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	1	3	1
	Total Obat Tradisional			144		23	0	0	0	10	48	6	6	0	0	0	0	0	42	6
	Total Suplemen Kesehatan			48		6	0	0	0	2	20	9	7	0	2	0	0	2	11	9
	Total Kosmetik			288		30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	0	4	36	24
	Jakarta			608	Targeted	59	0	0	0	34	132	40	33	2	5	0	0	7	92	40
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		59	0	0	0	34	132	40	33	2	5	0	0	7	92	40
	Total Obat			512	Random	60	0	0	0	4	87	39	35	0	4	0	0	4	48	39
	Total Obat Tradisional			336		39	0	0	0	16	80	15	15	0	0	0	0	0	65	15
	Total Suplemen Kesehatan			112		19	0	0	0	8	49	13	13	0	0	0	0	0	36	13
	Total Kosmetik			671		68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	0	20	87	54
	Jakarta			1631	Random	186	0	0	0	72	357	121	97	0	24	0	0	24	236	121
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		186	0	0	0	72	357	121	97	0	24	0	0	24	236	121
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		245	0	0	0	106	489	161	130	2	29	0	0	31	328	161
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	36	0	0	0	0	47	10	9	1	0	0	0	1	37	10
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	Jakarta	759	Random	47	0	0	0	0	177	63	58	5	0	0	0	5	114	63
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	Total Pangan			160	Targeted	36	0	0	0	0	47	10	9	1	0	0	0	1	37	10
	Total Pangan			759	Random	47	0	0	0	0	177	63	58	5	0	0	0	5	114	63
	TOTAL PANGAN			919		83	0	0	0	0	224	73	67	6	0	0	0	6	151	73
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0	0	Random						0	0						0	0	0
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	April														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS: MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMS: TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMS: TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS: TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	1	0	3
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	60	0	0	0	4	108	52	46	0	6	0	0	6	56	52
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	640		60	0	0	0	4	111	55	48	0	7	0	0	7	56	55
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan	sampel	Jakarta	144	Targeted	3	0	0	0	0	45	25	25	0	0	0	0	0	20	25
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	39	0	0	0	10	104	41	41	0	0	0	0	0	63	41
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	480		42	0	0	0	10	149	66	66	0	0	0	0	0	83	66
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	3	0	0	0	1	14	5	5	0	0	0	0	0	9	5
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	0	0	0	0	0	36	12	12	0	0	0	0	0	24	12
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	160		3	0	0	0	1	50	17	17	0	0	0	0	0	33	17
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	11	66	6	4	0	1	1	0	2	60	6
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	73	0	0	0	23	160	39	27	0	12	0	0	12	121	39
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	959		103	0	0	0	34	226	45	31	0	13	1	0	14	181	45
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	1	0	3
	Total Obat Tradisional			144		3	0	0	0	0	45	25	25	0	0	0	0	0	20	25
	Total Suplemen Kesehatan			48		3	0	0	0	1	14	5	5	0	0	0	0	0	9	5
	Total Kosmetik			288		30	0	0	0	11	66	6	4	0	1	1	0	2	60	6
	Jakarta			608	Targeted	36	0	0	0	12	128	39	36	0	2	1	0	3	89	39
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		36	0	0	0	12	128	39	36	0	2	1	0	3	89	39
	Total Obat			512	Random	60	0	0	0	4	108	52	46	0	6	0	0	6	56	52
	Total Obat Tradisional			336		39	0	0	0	10	104	41	41	0	0	0	0	0	63	41
	Total Suplemen Kesehatan			112		0	0	0	0	0	36	12	12	0	0	0	0	0	24	12
	Total Kosmetik			671		73	0	0	0	23	160	39	27	0	12	0	0	12	121	39
	Jakarta			1631	Random	172	0	0	0	37	408	144	126	0	18	0	0	18	264	144
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		172	0	0	0	37	408	144	126	0	18	0	0	18	264	144
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		208	0	0	0	49	536	183	162	0	20	1	0	21	353	183
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	280	Targeted	28	0	0	0	0	65	38	33	5	0	0	0	5	27	38
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	Jakarta	759	Random	81	0	0	0	1	205	128	125	0	3	0	0	3	77	128
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	Total Pangan			280	Targeted	28	0	0	0	0	65	38	33	5	0	0	0	5	27	38
	Total Pangan			759	Random	81	0	0	0	1	205	128	125	0	3	0	0	3	77	128
	TOTAL PANGAN			1039		109	0	0	0	1	270	166	158	5	3	0	0	8	104	166
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	25				1	48	30	25	5	0	0	0	5	18	30
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0	0	Random						0	0						0	0	0
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	25	0	0	0	1	48	30	25	5	0	0	0	5	18	30
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		25	0	0	0	1	48	30	25	5	0	0	0	5	18	30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Mei														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	60	0	0	0	3	116	42	39	0	3	0	0	3	74	42
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	640		60	0	0	0	3	116	42	39	0	3	0	0	3	74	42
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan	sampel	Jakarta	144	Targeted	6	0	0	0	1	26	12	8	0	4	0	0	4	14	12
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	18	0	0	0	0	81	13	7	1	5	0	0	6	68	13
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	480		24	0	0	0	1	107	25	15	1	9	0	0	10	82	25
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	6	0	0	0	2	15	2	1	0	1	0	0	1	13	2
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	17	0	0	0	1	41	14	9	0	5	0	0	5	27	14
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	160		23	0	0	0	3	56	16	10	0	6	0	0	6	40	16
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	20	0	0	0	12	80	18	4	0	14	0	0	14	62	18
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	70	0	0	0	23	191	54	24	0	30	0	0	30	137	54
			-								0	0						0	0	0
			-								0	0						0	0	0
			TOTAL	959		90	0	0	0	35	271	72	28	0	44	0	0	44	199	72
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Obat Tradisional			144		6	0	0	0	1	26	12	8	0	4	0	0	4	14	12
	Total Suplemen Kesehatan			48		6	0	0	0	2	15	2	1	0	1	0	0	1	13	2
	Total Kosmetik			288		20	0	0	0	12	80	18	4	0	14	0	0	14	62	18
	Jakarta			608	Targeted	32	0	0	0	15	121	32	13	0	19	0	0	19	89	32
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		32	0	0	0	15	121	32	13	0	19	0	0	19	89	32
	Total Obat			512	Random	60	0	0	0	3	116	42	39	0	3	0	0	3	74	42
	Total Obat Tradisional			336		18	0	0	0	0	81	13	7	1	5	0	0	6	68	13
	Total Suplemen Kesehatan			112		17	0	0	0	1	41	14	9	0	5	0	0	5	27	14
	Total Kosmetik			671		70	0	0	0	23	191	54	24	0	30	0	0	30	137	54
	Jakarta			1631	Random	165	0	0	0	27	429	123	79	1	43	0	0	44	306	123
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		165	0	0	0	27	429	123	79	1	43	0	0	44	306	123
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		197	0	0	0	42	550	155	92	1	62	0	0	63	395	155
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	280	Targeted	3	0	0	0	0	30	20	13	6	1	0	0	7	10	20
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	Jakarta	759	Random	83	0	0	0	0	160	27	27	0	0	0	0	0	133	27
	0	0	-								0	0						0	0	0
	0	0	-								0	0						0	0	0
	Total Pangan			280	Targeted	3	0	0	0	0	30	20	13	6	1	0	0	7	10	20
	Total Pangan			759	Random	83	0	0	0	0	160	27	27	0	0	0	0	0	133	27
	TOTAL PANGAN			1039		86	0	0	0	0	190	47	40	6	1	0	0	7	143	47
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	5	0	0	0		23	20	13	6	1	0	0	7	3	20
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0								0	0						0	0	0
	-	0	0	0	Random						0	0						0	0	0
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	5	0	0	0	0	23	20	13	6	1	0	0	7	3	20
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		5	0	0	0	0	23	20	13	6	1	0	0	7	3	20

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Juni															Hasil perhitungan		
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	RAPK s.d TW II		
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS: MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMS: TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMS: TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				pembilang	Penyebut	capaian
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																							
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted						0	0						0	0	0	2	4	50,00%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			Jakarta	512	Random						74	0						0	74	0	145	162	89,51%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			TOTAL	640		0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0	87	97	89,69%
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan	sampel	Jakarta	144	Targeted						14	0						0	14	0	45	49	91,84%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			Jakarta	336	Random						68	0						0	68	0	78	86	90,70%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			TOTAL	480		0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	82	0	81	91	89,01%
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted						13	0						0	13	0	13	16	81,25%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			Jakarta	112	Random						27	0						0	27	0	34	39	87,18%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			TOTAL	160		0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	27	33	81,82%
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted						62	0						0	62	0	38	58	65,52%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			Jakarta	671	Random						137	0						0	137	0	91	156	58,33%
			-								0	0						0	0	0			
			-								0	0						0	0	0			
			TOTAL	959		0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	199	0	59	117	50,43%
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total Obat Tradisional			144		0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0			
	Total Suplemen Kesehatan			48		0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0			
	Total Kosmetik			288		0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0			
	Jakarta			608	Targeted	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0			
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	89	0	98	127	77,17%
	Total Obat			512	Random	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74	0			
	Total Obat Tradisional			336		0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	68	0			
	Total Suplemen Kesehatan			112		0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0			
	Total Kosmetik			671		0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	137	0			
	Jakarta			1631	Random	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	306	0			
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	306	0	348	443	78,56%
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	395	0	446	570	78,25%
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																						0	
1	Pangan	sampel	Jakarta	280	Targeted						10	0						0	10	0	87	110	79,09%
	0	0	-								0	0						0	0	0			
	0	0	-								0	0						0	0	0			
	0	0	Jakarta	759	Random						133	0						0	133	0	210	218	96,33%
	0	0	-								0	0						0	0	0			
	0	0	-								0	0						0	0	0			
	Total Pangan			280	Targeted	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	87	110	79,09%
	Total Pangan			759	Random	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	133	0	210	218	96,33%
	TOTAL PANGAN			1039		0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	143	0	297	328	90,55%
Sampel Makanan FORTIFIKASI																						0	
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted						3	0						0	3	0	70	92	76,09%
	Jakarta	0	0								0	0						0	0	0			
	-	0	0								0	0						0	0	0			
	-	0	0	0	Random						0	0						0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Total targeted	0	0								0	0						0	0	0			
	Total Obat	0	0								0	0						0	0	0			
	Total Pangan			120	Targeted	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	70	92	76,09%
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	70	92	76,09%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan I tahun 2021

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	**MK**	22	15	18	8	3	31							**97**
		Jakarta	22	15	18	8	3	31							**97**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	3	39	13	23	1	29							**78**
		Jakarta	3	39	13	23	1	29							78
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	19	34	52	56	57	79							**297**
		Jakarta	19	34	52	56	57	79							**297**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		-													**0**
		-													**0**
		TMK	1	6	8	4	3	1							**23**
		Jakarta	1	6	8	4	3	1							**23**
		-													**0**
		-													**0**
OBAT TRADISIONAL	Iklan	**MK**	0	0	0	0	0	0							**0**
		Jakarta	0	0	0	0	0	0							**0**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	23	30	25	22	50	15							**165**
		Jakarta	23	30	25	22	50	15							**165**
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	29	58	36	32	23	59							**237**
		Jakarta	29	58	36	32	23	59							**237**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		-													**0**
		-													**0**
		TMK	0	2	26	10	1	14							**53**
		Jakarta	0	2	26	10	1	14							**53**
		-													**0**
		-													**0**
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	**MK**	0	0	0	0	0	0							**0**
		Jakarta	0	0	0	0	0	0							**0**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	10	20	15	15	5	5							**70**
		Jakarta	10	20	15	15	5	5							**70**
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	19	25	16	2	20	15							**97**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Jakarta	19	25	16	2	20	15							**97**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	0	0	10	1	3	1							**15**
		Jakarta	0	0	10	1	3	1							**15**
		-													**0**
		-													**0**
KOSMETIK	Iklan	**MK**	2	290	171	59	92	30							**644**
		Jakarta	2	290	171	59	92	30							**644**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	19	30	18	10	50	22							**149**
		Jakarta	19	30	18	10	50	22							**149**
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	17	76	32	69	55	56							**305**
		Jakarta	17	76	32	69	55	56							**305**
		-													**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		-						2							**0**
		TMK	3	26	66	34	35	24							**188**
		Jakarta	3	26	66	34	35	24							**188**
		-													0
		-													**0**
PANGAN	Iklan	**MK**	0	20	6	19	20	5							**70**
		Jakarta	0	20	6	19	20	5							**70**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	50	60	44	31	30	45							**260**
		Jakarta	50	60	44	31	30	45							**260**
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	80	98	93	108	86	77							**542**
		Jakarta	80	98	93	108	86	77							**542**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	2	3	0	1	0	9							**15**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Jakarta	2	3	0	1	0	9							**15**
		-													**0**
		-													**0**
ROKOK	Iklan	**MK**	4	6	4	4	3	2							**23**
		Jakarta	4	6	4	4	3	2							**23**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	26	24	26	26	27	28							**157**
		Jakarta	26	24	26	26	27	28							**157**
		-													**0**
		-													**0**
	Label	**MK**	7	10	0	0	7	13							**37**
		Jakarta	7	10	0	0	7	13							**37**
		-													**0**
		-													**0**
		TMK	8	5	15	15	8	2							**53**
		Jakarta	8	5	15	15	8	2							**53**
		-													**0**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		-													**0**
TOTAL	**Iklan**	**MK**	28	133	199	90	118	68							**834**
		Jakarta	28	133	199	90	118	68							**834**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		TMK	131	173	141	127	163	144							**879**
		Jakarta	131	173	141	127	163	144							**879**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		Total iklan	159	504	340	217	281	212							**1713**
	Label	**MK**	171	301	229	267	248	299							**1515**
		Jakarta	171	301	229	267	248	299							**1515**
		-	0	0	0										**0**
		-	0	0	0										**0**
		TMK	14	42	125	65	50	51							**347**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Jakarta	14	42	125	65	50	51							**347**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		-	0	0	0	0	0	0							**0**
		Total label	185	343	354	332	298	350							**1862**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Triwulan I tahun 2021

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni							
1	Layanan informasi a)	207	221	245	206	152	221							1252
														0
														0
2	Layanan pengaduan b)	2	3	3	1	2	0							11
														0
														0
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	1	3	2	4	1	2							13
														0
														0
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	2	2	4	0	2							10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni							
														0
														0
5	KIE di Area *Car Free Day* (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	0	0	1	7	7	1							16
														0
														0
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	17	26	34	33	41	66							217
														0
														0
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	0	0	1	0							1
														0
														0
8	Sebagai Narasumber h)	0	2	3	7	0	13							25

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni							
														0
														0
	Total	227	257	290	262	204	305							1545
		0	0	0	0	0	0							0
		0	0	0	0	0	0							0
		227	257	290	262	204	305							1545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN